

LAPORAN PENELITIAN

NIKAH MUT'AH DALAM ISLAM
(Studi Kritis Terhadap Argumentasi Syiah dan Sunni)

Resume Penelitian ini telah diseminarkan pada hari Senin
10 Maret 1997 di Aula Rektorat IAIN Alauddin
Ujungpandang

Oleh:

ABUSTANI ILYAS

NIP. 150 259 010.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
UJUNG PANDANG

1997



DEPARTEMEN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG
PUSAT PENELITIAN

Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp 864928 - 864931 (Fax 864623)

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena penelitian ini telah selesai dilaksanakan untuk tahun 1996/1997.

Penelitian merupakan dharma kedua dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut berarti bahwa setiap dosen maupun mahasiswa mempunyai tugas melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus berfungsi sebagai masukan bagi upaya pembangunan Agama, Bangsa dan Negara.

Kami tetap mengharapkan agar penelitian yang dilakukan oleh Dosen dalam lingkungan IAIN Alauddin dapat semakin meningkat dimasa yang akan datang, baik dalam hal kuantitasnya maupun kualitasnya.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Peneliti yang telah melaksanakan penelitiannya dengan baik dan mengharapkan agar penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmiah, khususnya di IAIN dan untuk diaplikasikan dalam pembinaan masyarakat dan bangsa. Semoga Allah SWT memberikan kepadanya pahala yang setimpal, Amin.

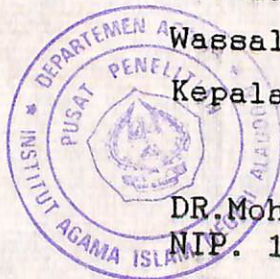
Ujungpandang, 18 Maret 1997

Wassalam,

Kepala,

DR. Moh. Natsir Mahmud, M.A.

NIP. 150 217 170





DEPARTEMEN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG
PUSAT PENELITIAN
Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp 864928 - 864931 (Fax 864623)

PERPUSTAKAAN
IAIN ALAUDDIN

SURAT KETERANGAN

Nomor : PL/TL.01/124/1997

Kepala Pusat Penelitian IAIN Alauddin, menerangkan bahwa :

N a m a : Drs. ABUSTANI ILYAS, M.Ag
N I P : 150 259 010
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
: Asisten Ahli Madya
Unit Kerja : Fakultas Dakwah IAIN Alauddin
Ujungpandang
Topik Penelitian : NIKAH MUT'AH DALAM ISLAM
(Studi Kritis Terhadap Argumentasi
Syiah dan Sunni)

Yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian Tahun 1996/1997 dan Resumennya telah diseminarkan di Pusat Penelitian IAIN Alauddin Ujungpandang tanggal 10 - 11 Maret 1997. Laporan lengkap telah diserahkan kepada Pusat Penelitian IAIN Alauddin Ujungpandang.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

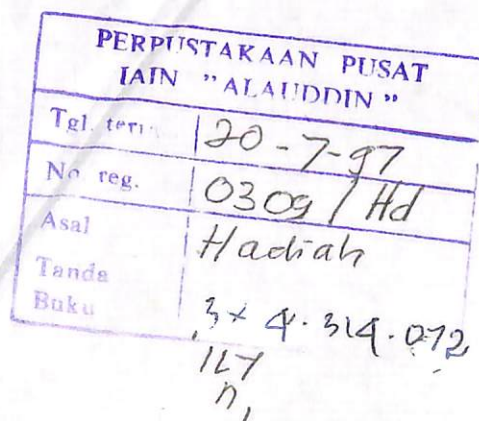


Ujungpandang, 18 Maret 1997

DR. MUH. NATSIR MAHMUD, MA
NID. 150 217 170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KETERANGAN	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1- 18
A. Latar Belakang dan Pokok Masalah	1
B. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan	9
C. Tinjauan Kepustakaan	13
D. Tujuan dan Kegunaan	14
 BAB II : NIKAH MUT'AH	 19-43
A. Pengertian Nikah Mut'ah	19
B. Hukum-hukum dan Hukum Mut'ah	24
C. Latar Belakang Terjadinya Nikah Mut'ah	33
 BAB III : STUDI KRITIS TERHADAP DALIL-DALIL NIKAH MUT'AH	 44-87
A. Nikah Mut'ah dan Al Qur'an	44
B. Nikah Mut'ah dan Hadis	62
 BAB IV : PENUTUP	 88-92
A. Kesimpulan	88
B. Implementasi Penelitian	91
 DAFTAR PUSTAKA	 93-98



NIKAH MUT'AH DALAM ISLAM

(Studi Kritis terhadap Argumentasi Syiah dan Sunni)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Pokok Masalah

Sebagai makhluk mulia, manusia diciptakan oleh Allah swt. terdiri atas dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kedua unsur itu, masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, akan tetapi, saling menopang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Salah satu kecenderungan manusia yang amat vital yang bersangkutan langsung dengan unsur jasmaniah adalah keinginan untuk memenuhi nafsu seksual atau kebutuhan untuk kawin. Kebutuhan ini tak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia sebagai kodrat dari Allah swt., sehingga keberadaannya sering diibaratkan makanan dan minuman dalam kehidupan.

Terlihat begitu urgennya pemenuhan nafsu seksual, maka tidak jarang ditemukan pelaku-pelaku peleceh seksual, seperti kumpul kebo (*living together*) yakni hidup bersama seperti layaknya suami isteri tanpa ikatan nikah. Pelecehan seksual seperti itu, tampaknya semakin meningkat karena tidak hanya menimpah kaum bodoh dan kaum berstrata rendah, tetapi juga kaum terpelajar dan kaum elit, sehingga kesakralan perkawinan yang dijunjung tinggi itu seakan-akan tidak dihargai lagi.

Okky Asokawati (seorang sarjana psikologi) mengemukakan hasil kesimpulan penelitiannya bahwa telah banyak penduduk di berbagai kota di Indonesia melakukan kumpul kebo.¹ Maka dari itu, ahli agama dan pemerhati sosial sebahagian dari mereka memberikan alternatif nikah mut'ah dari pada melakukan yang nyata-nyata amoral dan bertentangan dengan agama. Akan tetapi, masalahnya, nikah itu sendiri diperselisihkan oleh ulama sampai sekarang, sebahagian dari mereka menghalalkan dan sebahagian yang lain mengharamkannya.

Terlepas dari persoalan tersebut, dalam agama dikemukakan bahwa salah satu alternatif untuk menghindari perbuatan keji itu, yakni mempercepat perkawinan orang-orang yang masih berstatus bujangan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nur (24): 32, berikut ini:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika merteka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemeberianNya) lagi Maha Mengetahui.²

Di samping kewajiban seorang wali di atas, juga dijumpai keharusan bagi pemuda untuk memenuhi perintah tersebut, Allah ber-firman dalam QS. al-Nisa (4): 3:

¹Lihat hasil penelitian Okky Asokawati dalam Hasanuddin, "Nikah Mut'ah Diperlukan?", *Amanah*, No. 128, 1993, h. 110.

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semaranag: Toha Putra, 1989), h. 549.

... فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...

Artinya: ... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...³

Demikian pula Rasul saw. bersabda:⁴

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ...

Artinya: Hai sekalian pemuda! barangsiapa di antara kamu memiliki belanja, maka kawinlah karena (perkawinan) itu menjaga pandangan serta membentengi kemaluan...

Meskipun demikian, tampaknya dalam realitas hidup ini tetap merupakan problema yang tidak dapat dimungkiri adanya, dan tidak pula dianggap enteng bahayanya. Hal itu telah menjadi problema dalam kehidupan yang terus menerus sepanjang sejarah.

Dalam agama Islam, pemenuhan nafsu seksual tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang hina, tetapi merupakan hal yang di-*ridai* asal dilakukan menurut tuntutan syariat yang telah ditetapkan. Sebab, telah menjadi *sunnatullah* bahwasanya manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, yang keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dengan demikian, masalah pemenuhan nafsu seksual erat sekali kaitannya dengan perkembangbiakan. Persoalan ini telah disinggung prosesnya dalam Alquran QS. al-Nisa (4): 1, berikut:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء ...

³ *Ibid.*, h. 115.

⁴ Abu Husayn Muslim al-Hajjaj al-Qusyayriy, *Sahih Muslim*, jilid II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 1018.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...⁵

Menurut Imam Al-Gazaliy, perkawinan itu merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yang lebih utama dari itu adalah sebagai jalan untuk memperoleh keturunan agar dunia ini tidak sepi dari jenis manusia. Sedangkan syahwat seksual bagi manusia berfungsi sebagai sarana pembangkit untuk mewujudkan tujuan utama tersebut. Antara tujuan (memperoleh anak) dan sarana (nafsu seksual) tidaklah sama derajatnya, meskipun keduanya merupakan pemberian Allah swt.⁶ Dengan demikian, tidaklah pantas dikatakan bahwa yang menjadi tujuan utama perkawinan adalah mencari kelezatan, sedang anak merupakan kensekuensi darinya. Akan tetapi, yang benar adalah untuk memperoleh anak sebagai tujuan utama melangsungkan per-kawinan yang sesuai fitrah manusia.

Hal yang serupa itu dikemukakan oleh Sadr Al-Syaria bahwa tujuan perkawinan adalah melegalisasi hubungan seks antar dua jenis kelamin manusia, dengan maksud untuk memperoleh keturunan, mengatasi kaum laki-laki dari penyelewengan, mempertahankan kesucian, mewujudkan cinta kasih antar suami isteri serta saling membantu dalam memperoleh nafkah.⁷

⁵Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 114.

⁶Lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazâliy, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, jilid II (Bairut: Dâr al-Fikr, 1991), h. 38.

⁷Lihat uraian Sadr al-Syaria, *Taudîh*, dalam Muhammad Muslehuddin, *Mut'a (Temporary Marriage)* (New York: Islamic Publication, 1969), h.56.

Selain tujuan di atas, A. A. Fyzee melihatnya dari aspek sosial dan aspek hukum. Beliau menjelaskan bahwa disyariatkannya per-awinan bukan hanya sekedar mengabsahkan hubungan suami isteri, tetapi hubungan itu dapat dilihat dari aspek sosial, sebagai berikut: (1) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita secara umum, baik fisik maupun psikis; (2) Menciptkan stabilitas dalam keluarga dan dalam masyarakat; dan (3) Mendatangkan sakinah (ketentraman batin) secara timbal balik, suami kepada isterinya dan isteri kepada suaminya, bahkan kepada semua individu yang terlibat dalam keluarga tersebut.

Adapun dari aspek hukum, perkawinan merupakan perjanjian suci antar suami isteri untuk membina rumah tangga bahagia. Dalam ikatan ini terdapat aturan-aturan tentang hak dan kewajiban dari semua person yang ada pada keluarga.⁸

Dari uraian-uraian di atas menunjuk bahwa perkawinan yang disyariatkan kepada umat manusia merupakan penghormatan yang sesuai dengan martabatnya dan sekaligus pembeda dari makhluk-makhluk lainnya, yang bebas bergaul tanpa diatur oleh syariat. Dalam hal ini, perkawinan disyariatkan kepada manusia demi kemaslahatan manusia itu sendiri, yang bertujuan untuk mempertahankan jenis manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar tercipta tatanan keluarga yang bahagia dan abadi. Apabila semua kondisi keluarga demikian

⁸Lihat A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (London: Oxford University Press, 1955), h. 71-72.

adanya, maka terciptalah kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram.

Salah satu bentuk perkawinan yang pernah dipraktekkan dalam dunia Islam adalah Nikah Mut'ah. Nikah ini kadang pula disebut *nikah al-mu'qqat* (nikah berjangka) atau *nikah al-munqati'* (nikah terputus) karena ikatan perkawinan itu harus berakhir pada waktu yang telah disepakati bersama (suami isteri) dalam akad.

Pelaksanaan nikah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan seksual (*istimta'*) dari lawan jenis dalam jangka tertentu dan dengan mahar tertentu pula.

Pada awal perkembangan Islam, bentuk nikah ini tidak diperselisihkan oleh ulama-ulama karena diberlakukan oleh Nabi serta dipraktekkan oleh sebahagian sahabat-sahabatnya dalam kondisi tertentu. Salah satu hadis Nabi saw. menerangkan :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا، يعنى متعة النساء .
رواه مسلم .⁹

Artinya: Sesungguhnya Rasul saw. telah mengizinkan kamu sekalian bersenang-senang, yakni kesenangan kawin mut'ah.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul perbedaan pendapat bahwa apakah nikah mut'ah itu telah dibatalkan hukumnya secara mutlak, temporal, lokal atau tidak sama sekali. Oleh karena dalam per-kembangan

⁹ Muslim, *op. cit.*, h. 102-103; Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 630-631.

selanjutnya ditemukan sejumlah ayat dan hadis yang me-larang nikah tersebut. Antara lain dikemukakan oleh Rasul saw:

انّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. رواه النساء .¹⁰

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada masa Perang Khaibar. (HR. Al-Nasâi).

Berdasarkan riwayat tersebut, maka timbullah pemahaman yang kontroversial tentang kedudukan hukum nikah mut'ah, di satu pihak ada yang mengharamkannya secara mutlak dan di sisi lain ada pula yang membolehkannya. Kedua versi tersebut, di samping menggunakan argumentasi nas-nas juga argumentasi logis berdasarkan rasio.

Pada versi pertama, mereka meyakini bahwa nikah mut'ah tetap berlaku sampai sekarang asal memenuhi syarat-syaratnya. Karena itu, pelaksanaan nikah mut'ah menurut Al-Tabatabai berlaku pada masa Nabi saw. dan pada masa Abu Bakar hingga keduanya wafat. Selanjutnya pada masa Umar bin al-Khattab nikah ini pun tetap dilaksakan sampai beliau melarangnya.¹¹

Pada versi kedua, mereka memandang nikah mut'ah tidak dibenarkan lagi karena telah dibatalkan dari dalil-dalil lain. Karena itu,

¹⁰Abu 'Abd al-Rahman bin Syu'ib al-Nasâi, *Sunan al-Nasâi*, juz V(Mesir: Syirkah Maktabah wa Mustafa al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduhû, t.th.), h. 102-103; Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhâriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhâriy*, juz III (t.t.: Dar Ihya al-kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 246.

¹¹Muhammad Husayn al-Tabatabai, *al-Mizân fî Tasîr al-Qur'ân*, juz IV (Cet. I; Bairut: Muassasah al-A'lamî al-Maṭbu'ât, 1991), h. 303.

pelaksanaannya hanya berlangsung sampai pada tahun ke-tiga hijriah.¹² Sedang menurut Al-Nawawiy, kebolehan itu hanya pada dua tempat, yaitu, pada Perang Khaibar dan diharamkan pada masa itu pula, dan ketika terjadi pembebasan kota Mekah (*Âm al-Fath*), kemudian diharamkan untuk seterusnya.¹³

Selain dari perbedaan waktu di atas, dari masing-masing versi juga memandang nikah mut'ah dari perspektif yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini, Ja'far Murtada al-Amili (seorang penganut mazhab Syiah) mengatakan bahwa nikah mut'ah itu sangat dipentingkan saat-saat sekarang ini karena semakin merajalelanya perzinaan.¹⁴ Seiring dengan pernyataan itu dikemukakan pula Al-Tabatabai bahwa nikah ini seharusnya dijadikan pendamping dari nikah permanen.¹⁵ Pada intinya kedua orang tersebut membolehkannya agar manusia selamat terhindar dari pengaruh bahaya seksual pada abad modern ini.

Lain halnya dengan versi kedua, jika dikatakan nikah mut'ah mampu meredam gejolak seksual, maka versi ini justru mangemukakan yang sebaliknya yakni dengan memberlakukan nikah mut'ah justru memudahkan kehidupan *free sex*.¹⁶ Pada akhirnya, nikah ini akan

¹²Lihat Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam; A History of The Prophet* (India: Idarat-i Adabiyat-i Delli, 1978), h. 229.

¹³Lihat penjelasan Al-Nawawî dalam Abu Husayn Muslim, *loc. cit.*

¹⁴Lihat Ja'far Murtada al-Amili, *al-Zawâj al-Muaqqat fî al-Islâm*, diterjemahkan oleh Abu Muhammad Jawad, *Nikah Mut'ah Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992), h. 1-4.

¹⁵Muhammad al-Husayn al-Tabatabai, *op. cit.*, h. 323.

¹⁶Ahmad Amin, *Duhâ al-Islâm*, juz III (Bairut: Dar al-Kitâb al-'Arabiy, t.th.), h.259.

menjerumuskan ke arah dekadensi moral yang lebih parah lagi khusus-ya bagi kaum laki-laki, serta kaum wanita ke lembah kenistaan.

Selain dari itu, nikah mut'ah bertentangan dengan nikah yang dianjurkan oleh agama (*nikah dâim*) yang menginginkan pergaulan sepanjang masa tanpa batasan waktu. Karena itu, Al-Walid memandang nikah itu diharamkan hukumnya secara *mutawâtir*, akan tetapi, yang diperselisihkan, kapan nikah itu diharamkan secara mutlak.¹⁷

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, dari masing-masing kubu mempertahankan pendiriannya hingga kini. Jika versi pertama yang dianut oleh mazhab Syiah, di mana mereka meyakini keabsahan nikah mut'ah, maka pada versi kedua dianut oleh mazhab Sunni yang mengharamkan secara mutlak.

Bertolak dari uraian-urain di atas, maka penulis mencoba mengkaji persoalan ini dengan mendasarkan pada pokok masalah, bagaimana kehujjahan dalil-dalil nikah mut'ah menurut argumentasi mazhab Syiah dan mazhab Sunni.

B. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

Agar pemahaman lebih jelas, maka beberapa istilah pokok dalam judul tesis ini perlu dipahami secara proporsional, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif, utuh dan bermakna. Pema-

¹⁷ Abu al-walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusyd al-Qurtubiy al-Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid, jilid II (t.t.: Dar al-Fikr al-Tabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawsiy, t.th.), h. 43.

haman itu sangat penting karena di setiap istilah dalam kajian ilmiah selalu didasarkan kepada konsep tertentu. Kejelasan istilah akan memudahkan pemahaman terhadap konsep dan istilah yang digunakan, sehingga kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara jelas dan implementasinya terkendali dengan baik.

Dalam judul tesis ini terdapat beberapa kata atau istilah yang perlu mendapatkan penjelasan, yaitu sebagai berikut:

Nikah mut'ah adalah dua rangkaian kata yang tersusun, yakni dari kata nikah dan mut'ah. Nikah yang dimaksudkan dalam hal ini bersesuaian dengan arti bahasanya, yakni berkumpul, menindis dan saling memasukkan.¹⁸ Sedangkan nikah menurut aslinyaberarti bersetubuh, dan secara majaz adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹⁹ Sedang mut'ah menurut bahasa ialah *tamatta'a wa talazzaz* (kesenangan dan kelezatan).²⁰

Adapun menurut istilah nikah mut'ah adalah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan harta (mahar) tertentu, waktu tertentu dan perkawinan berakhir dengan berakhirnya kotrak yang telah disepakati tanpa talak, tidak mengehendaki belanja, tempat tinggal dan

¹⁸Muhammad bin Isma'il al-San'âniy, *Subl al-Salâm*, jilid III (Riyad: al-Jâmi'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islâmiyah, 1408 H), h. 173.

¹⁹Abu al-'Ainayn Badran, *al-Zawâj wa al-Islâm* (Kairo: t.tp., t.th.), h.20.

²⁰Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm* (Cet. XXVIII; Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 745-746.

tidak pula saling mewarisi antar keduanya (suami isteri) apabila salah satunya ada yang meninggal sebelum masa perkawinan berakhir.²¹

Sejalan dengan pengertian itu, dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawiy bahwa nikah mut'ah adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu pula.²²

Pengertian-pengertian yang dikemukakan dapat digunakan untuk memahami pengertian judul tesis ini, yakni perkawinan yang dilakukan untuk sementara waktu (sehari, seminggu dan seterusnya) dengan maksud untuk memperoleh kelezatan seksual tanpa pembeban-an nafkah dan tempat tinggal bagi suami.

Syiah menurut menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut.²³ Pada saat sekarang, kata *syi'ah* telah mengalami perkembangan pengertian yang menjurus kepada pengertian tersendiri, yaitu nama bagi sekelompok orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abî Talib.

Menurut sejarah dan Pemikiran Islam, Syiah merupakan suatu golongan yang menginginkan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi

²¹Lihat Syekh Muhammad al-Hamid, *Nikâh Mut'ah fî al-Islâm Haram* (Bairut: Dar al-Kalâm, 1988), h. 11.

²²Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawi, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, *Halal dan haram Dalam Islam* (t.t.: Bina Ilmu, 1993), h. 257.

²³"Syi'ah", dalam Houston Smith, *The Concise Ensiclopedia of Islam* (London: Satecey International and Ciril Glasse, 1989), h. 364.

Muhammad saw. dipegang oleh keluarga Nabi yang terdekat, yakni Ali beserta turunannya.²⁴

Pada perkembangan selanjutnya, Syiah sebagai suatu sekte terbagi lagi atas beberapa sekte, yaitu Sekte Kaisaniyah, Sekte Zaidiyah dan Sekte Imamiyah. Sedang Syiah yang relevan dengan judul yang dimaksudkan adalah Syiah Imamiyah, yaitu golongan yang meyakini bahwa Ali bin Abi Talib sebagai imam pengganti Nabi Muhammad saw. setelah ia tiada berdasarkan penunjukan langsung secara tegas dari Nabi sendiri.²⁵ Syiah Imamiyah inilah yang tetap eksis mempertahankan pendiriannya atas kebolehan nikah mut'ah.

Sunni berasal dari kata *sanna*, kemudian dijadikan bentuk *masdar* (kata benda jadian) yang mendapatkan sufiks *al-ya' al-nisbah*, *sunniy*. Sunnah menurut bahasa berarti lintasan, jalan atau tatacara.²⁶ Sedangkan menurut istilah, Sunnah adalah meliputi semua yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran, baik perkataan, perbuatan maupun takrir (pengakuan).²⁷ Jadi sunni merupakan suatu golongan yang dinisbahkan penamaannya pada Sunnah Rasul saw.

²⁴Lihat "Syi'ah" Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *op. cit.*, h. 2

²⁵Sekte-sekte yang terdapat dalam aliran Syiah bukan hanya tiga sekte, melainkan banyak, tetapi yang masyhur dan terbesar pengikutnya yang tiga itulah, lihat dalam *ibid.*, h. 6-9.

²⁶Muhammad A. Al-Buraey, *Administrative Development: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Achmad Nashir Budiman, ISLAM : *Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1986), h. 67.

²⁷Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣul al-Hadis 'Ulūmuhā wa Mustalahahū* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), h. 19.

Aliran Sunnah biasa juga disebut Aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jam'ah. Ahl al-Sunnah berarti orang-orang yang mengikuti atau menganut sunnah Nabi saw., dan jam'ah berarti mayoritas umat. Jadi yang dimaksud Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah nabi beserta sahabat-sahabatnya, baik berupa syariat (hukum agama Islam) maupun dalam akidah (kepercayaan). Dalam hal ini, yang dimaksudkan Sunni semua penganut aliran fiqh dalam Islam yang mendasarkan ajaran-ajarannya kepada Sunnah Nabi dan Sunnah sahabat-sahabatnya, disamping Alquran.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka penulis maksudkan nikah mut'ah dalam Islam adalah pandangan agama Allah yang berdasarkan wahyu Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. terhadap pelaksanaan nikah yang dilakukan hanya untuk sementara waktu. Ruang lingkup tersebut terbatas pada pemahaman Syiah Imamiyah yang membolehkan nikan mut'ah dan penganut Mazhab Sunni yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak.

C. Tinjauan Kepustakaan

Dalam banyak karangan buku yang berbahasa Indonesia, Inggris dan Arab telah ada yang membicarakan nikah mut'ah, seperti buku yang akan disebutkan berikut ini:

- a. Buku-buku berbahasa Indonesia, antara lain "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam Dr. H. T. Yanggo dan A. A. Hafiz Az,

MA., *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*, oleh Drs. Ramlan Yusuf Rangkuti. Di Majalah *Amanah*, oleh Dr. M. Amin Suma, “Mut‘ah: Syarat dan kontroversinya”, dan oleh Hasanuddin, “Nikah Mut‘ah Diperlukan”.

b. Buku-buku yang berbahasa Arab: *al-Zawāj al-Mu‘aqqat fī al-Islām*, dikarang oleh Ja‘far Murtada al-Amili. *Nikāh al-Mut‘ah* yang dikarang oleh Muhammad ‘Abd al-Rahman Syamīlah al-Ahdal, *al-Fuṣul al-Muhimmah fī Ta‘līf al-Ummah* karya Al-Imam Abd al-Husayn Syarafuddin al-Musawiy dan lain lain.

c. Buku-buku berbahasa Inggris: *Mut‘a (Temporary Marriage)*, oleh Dr. Muslehuddin, “Perkawinan Mut‘ah” pada bahagian kedua dalam *The Raights of Women in Islam*, Murtada Mutahhari.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap sejumlah buku-buku tersebut, agaknya kajian tentang kedudukan nikah mut‘ah masih diperlukan untuk lebih lanjut, sehingga dengannya dapat terungkap argumentasi-argumentasi yang rasional dan relevan dengan kondisi kekinian.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui metodologi dan penerapannya terhadap hukum pelaksanaan nikah mut‘ah, baik dari mazhab Syiah maupun dari mazhab Sunni.

Metodologi yang dimaksudkan adalah kaidah-kaidah yang digunakan oleh mereka untuk merumuskan suatu kesimpulan terhadap suatu masalah serta penerapannya dalam menetapkan suatu hukum (*istinbat al-hukm*).

Harapan yang terkandung dalam tujuan tersebut adalah agar umat Islam dapat memenuhi kedudukan hukum nikah mut'ah secara jelas.

Di samping itu, diharapkan pula setelah selesainya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan intelektual muslim, khususnya dalam bidang hukum tentang pelaksanaan nikah mut'ah. Serangkaian dengan itu, tesis ini dapat juga dijadikan alternatif bagi kepentingan dunia ilmiah dan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia khususnya, dan dunia Islam umumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian dalam tesis ini menggunakan studi komparatif (perbandingan), yaitu dengan cara membanding-bandingkan kedua objek, seperti persamaan dan perbedaan yang disertai latar belakang, akibat atau dampak, hikmah persamaan dan perbedaan yang ada.

Di samping itu, juga digunakan studi historis, yakni bertitik tolak pada latar belakang diberlakukannya nikah mut'ah, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat membantu memecahkan persoalan tersebut.

Terlepas dari pendekatan itu, usul fiqh juga berperan serta untuk dijadikan acuan sebagai jalan alternatif atas problema-problema yang dikaji.

Karena persoalan ini erat kaitannya dengan persoalan hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan yuridis, agar dapat diungkapkan secara jelas kedudukan hukum nikah mut'ah.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber informasi berupa buku-buku, majalah-majalah, ensiklopedi-ensiklopedi dan lain-lain, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan).

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi tersebut dibagi tiga sumbernya, yaitu:

- a. Sumber primer, meliputi sumber pokok ajaran Islam, yakni Alquran dan Sunnah Nabi saw, yang diperoleh dari berbagai, kitab hadis, baik dari kitab hadis Syiah maupun kitab hadis Sunni, antara lain: *Sahih al-Bukhâriy* oleh Imam al-Bukhâri, *Sahih al-Muslim* oleh Imam al-Muslim, *Sunan al-Turmuziy* oleh imam al-Turmuzi, atau disingkat kitab hadis yang enam (*al-Kutub al-Sittah*), *Furu' al-Kâfiy* oleh Al-Kullainiy dan kitab-kitab hadis lainnya.
- b. Sumber sekunder mencakup buku-buku yang dibahas kaidah-kaidah hukum Islam dan buku-buku nikah mut'ah, baik dari Syiah maupun dari Sunni, demikian pula kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan pembahasan. Kitab-kitab yang dimaksudkan seperti, *al-Muwâfaqât fî Uṣul al-Ahkâm* dan *al-Muwâfaqât fî Uṣul al-Syarî'ah*, keduanya dikarang oleh Al-Syâtibiy, *Tafsîr al-Nusus* oleh Adib Saleh, *Jurisprudence and its Principles* karya Murtada Mutahhari, *Li Akûn Ma'a Sâdiqîn* karya Dr. Al-

Tayjâniy al-Samâwiy, *Tafsîr al-Qurtubiy*, *Tafsir al-Bahr al-Muhîr*, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, *Tafsir al-Tabariy*, *Tafsir al-Mizân* dan kitab-kitab lainnya.

c. Sumber penunjang, yaitu semua buku-buku yang digunakan dalam penulisan tesis ini dan tidak termasuk kategori di atas. Seperti kamus-kamus bahasa Arab dan Inggris, mu'jam - mu'jam, ensiklopedi-ensiklopedi dan kitab-kitab lainnya.

Untuk mengolah data-data yang diperoleh digunakan metode diskripsi, komparasi dan analisis.²⁸

Pada tahap awal digunakan metode deskripsi guna menggambarkan keadaan objek tanpa disertai pengambilan keputusan atau kesimpulan. Jadi, metode ini bukan untuk pembahasan melainkan untuk menyajikan data menurut apa adanya.

Pada tahap kedua digunakan metode komparasi untuk membandingkan-bandingkan informasi satu sama lain yang ada relevansinya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih terungkapnya pemikiran Syiah dan Sunni terhadap hukum nikah mut'ah.

Pada tahap terakhir dipakai metode analisis guna memilih dan menetapkan pendapat siapa yang lebih tepat dan cocok untuk dikemukakan.

²⁸Lihat Koentjaraningrat, *Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 42; Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Umum UGM, 1977), h. 4.

BAB II

NIKAH MUT'AH

A. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu: nikah dan mut'ah. Kemudian keduanya membentuk suatu pengertian tersendiri sebagai suatu bentuk perkawinan yang diperselisihkan dalam Islam. Dan kadang kala nikah itu cukup disebut mut'ah saja, dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan tujuan yang dimaksud.

Nikah menurut bahasa ialah *al-'aqd* (perjanjian)¹ atau *al-wat'u* (senggama).² Menurut Ali al-Sâyis, kedua pengertian itu tidak dipertentangkan oleh ulama karena masing-masing dapat digunakan dalam artian tersebut, tergantung makna yang dikehendaki terhadap suatu ungkapan. Seperti firman Allah: *حتى تنكح زوجا غيره* (hingga dia bersenggama dengan suaminya)³ lebih tepat jika diartikan senggama, sedang kalimat berikut: *إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن* (apabila kamu kawini

¹Muhammad Husayn al-Tabatabai, *al-Mizân fi Tafsîr al-Qur'ân*, juz IV (Cet. I; Bairut: Muassasah al-A'lamîy li al-Maṭba'ah, 1991), h. 308; Ibn manzhur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anṣâriy, *Lisân al-'Arab*, jilid III (Mesir: Muassasah al-Miṣriyyah li al-Ta'lîf wa Tarjumah, t.th.), h. 465.

²Muhammad bin Ismâ'îl al-Sanâniy, *Subl al-Salâm*, jilid III (Cet. IV; Riyad: al-Jâmi'ah al-Imâm Muhammad bin Su'ud al-Ismâ'iliyah, 1404 H), h. 173.

³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h.

orang-orang mukmin itu kemudian kamu ceraikan sebelum kamu sentuh)⁴ lafal nikah yang dimaksudkan dalam teks ini adalah akad.⁵

Sedangkan lafal *mut'ah* adalah bentuk *masdar* (kata benda jadian) dari kata *mata'a*. Menurut bahasa ialah *tamattu' wa talazzuz* (sesuatu yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan),⁶ dan boleh juga diartikan *اتّنع وتلذذ به زمانا طويلا* (memperoleh manfaat atau bersenang-senang dengannya dalam waktu yang lama).⁷ Jika kedua kata itu dipadukan, maka secara bahasa dipahami bahwa nikah *mut'ah* merupakan suatu akad atau perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk memperoleh kesenangan seksual, bukan karena tendensi untuk membina rumah tangga yang abadi.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Abd. Rahman Al-Jaziriy berkata:⁸

اما حقيقة نكاح المتعة فهو ان يقيد عقد الزواج بوقت معين، كان يقول لها زوجيني نفسك شهرا او تزوجتك منه سنة، او نحو ذلك، سواء كان ذلك صادرا اما شهود ومباشرة ولي، اولا.

⁴*Ibid.*, h. 58.

⁵Lihat Muhammad Ali al-Sâ'is, *Tafsîr Ahkâm*, jilid II (Bandung: al-Ma'ârif, 1980), h. 114.

⁶Muhammad al-Hamid, *Nikah al-Mut'ah fi al-Islâm Harâm* (Bairut: Dâr al-Qalam, 1988), h. 11; Ibn Manzûr, *loc. cit.*

⁷Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm* (Cet. XXVIII; Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 745.

⁸Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*, jilid IV (Mesir: al-Maktabah al-Tijârah al-'Ubrâ, 1969), h. 2.

Artinya: Adapun hakekat nikah mut'ah, yakni diikatkannya akad perkawinan dengan waktu tertentu, seperti seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita "Saya kawinkan diriku denganmu selama sebulan" atau "Saya kawinkan kamu dengannya selama setahun", dan sebagainya, sama saja perkawinan itu dihadiri oleh saksi (wali) secara langsung atau tidak.

Muhammad al-Hamid berkata:⁹

ان ينكح الرجل المرأة بشئ من المال، مدة معين، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق ولا وجوب نفقة وسكنى، ولا توارث يجري بينهما ان مات احدهما قبل انتهاء النكاح.

Artinya: (nikah mut'ah) ialah seorang pria mengawini seorang wanita dengan imbalan tertentu, nikah berakhir dengan berakhirnya waktu tanpa talak, tidak dibebankan nafkah, tempat tinggal dan tidak pula saling-mewarisi, jika salah satu di antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya perkawinan.

Dr. Muhammad al-Tayjâniy al-Samâwiyy berkata :¹⁰

والمقصود بها نكاح المتعة، او الزواج المنقطع، او الزواج المؤقت الى اجل مسمى، وهى كالزواج الدائم لا تصح الا بعقد يشتمل على قبول وإيجاب كان تقول المرأة للرجل زوجتك نفسى بمهر قدره كذا ولمدة فيقول الرجل قبلت.

Artinya: Yang dimaksud nikah mut'ah, perkawinan terputus atau perkawinan terbatas pada waktu tertentu. Dan nikah ini sama halnya perkawinan permanen, (yakni) tidak sah tanpa disertai akad yang mencakup ijab kabul, seperti seorang wanita berkata kepada seorang pria "Saya mengawinkan diriku denganmu dengan mahar kira-kira sekian, selama sekian", maka lelaki ter-sebut menjawabnya "Saya terima (nikahnya)".

Prof. Dr. Rawâs Qalarjiy mengatakan:

متعة النكاح : نكاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين ."

⁹Muhammad al-Hamid, *loc. cit.*

¹⁰Muhammad al-Tayjâniy al-Samâwiyy, *Li Akûn Ma'a Sâdiqîn* (Cet. II; Bairut, Muassasah al-Fajr, 1990), h. 191.

¹¹Muhammad Rawâs Qalarjiy, dkk., *Mu'jam Lugah al-Fuqahâi*; 'Arabiy-Injliziyy (Cet. II; Mesir: Dar al-Nafâis, 1989), h. 403.

Artinya: Nikah mut'ah adalah dikawinya seorang wanita selama waktu tertentu dan dengan mahar tertentu pula.

Sehubungan definisi-definisi tersebut, maka ada dua hal yang dapat dikemukakan, yaitu:

a. Nama lain nikah mut'ah

Nikah mut'ah sebagai bentuk perkawinan memiliki nama-nama selain dari nama tersebut. Nikah mut'ah dinamai *nikah al-munqati'* (nikah terputus) dan *nikah al-muaqqat* (nikah temporer). Nama-nama tersebut diberikan padanya karena ada unsur kesesuaian dengan tujuan pelaksanaannya. Seperti dinamai mut'ah karena maksud nikah itu bertujuan untuk memperoleh legalitas hubungan seks selama priode tertentu yang disepakati bersama. Nikah ini disebut pula nikah terputus sebab keduanya (suami isteri) harus terputus berdasarkan waktu yang telah disepakati. Dan kadang pula dinamai nikah sementara sebab hubungan suami dan isteri hanya berlangsung untuk sementara waktu, misalnya sehari, seminggu dan seterusnya.

Nama-nama nikah tersebut, tampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar, bahkan boleh dikata, penamaan itu disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak mazhab Syiah dan Sunni. Namun yang paling menonjol dari nama-nama tersebut adalah nikah mut'ah sebab nama itulah yang lebih sesuai maksud dari motif pelaksanaannya.

b. Unsur-unsur yang terkait dalam nikah mut'ah, yaitu:

- 1) Harus ada akad yang mencakup ijab dan kabul

- 2) Harus ada mahar tertentu dan dinyatakan secara jelas ketika akad dilangsungkan
- 3) Lama perkawinan harus jelas, dan juga ditegaskan dalam akad, misalnya, sehari, seminggu, sebulan dan seterusnya. Dan hubungan suami isteri tersebut berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bersama
- 4) Bagi sang suami tidak dibebani nafkah dan tempat tinggal
- 5) Tidak saling mewarisi (antar suami isteri), kecuali hubungan anak dengan kedua orang tuanya.

Berdasarkan urain-uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa nikah mut'ah adalah suatu bentuk perkawinan yang memiliki tujuan tersendiri, tidak lain sekedar untuk bersedap-sedapan dengan wanita dalam waktu tertentu. Nikah ini, bila dilihat dari segi aturan-aturannya jelas berbeda dengan yang ada pada nikah dâim. Meskipun demikian, nikah ini tetap memiliki syarat-syarat, seperti adanya akad dan mahar, cuma yang membedakan dengan nikah dâim, adanya ikatan perkawinan harus dibatasi oleh waktu tertentu, tidak ada kewarisan khususnya suami dan isteri, tidak ada tanggung jawab nafkah dan tempat tinggal bagi suami, demikian pula bagi si isteri tidak dibebankan sebagaimana halnya isteri dalam nikah permanen.

B. Hukum-hukum dalam Nikah Mut'ah

Yang dimaksud hukum-hukum dalam nikah mut'ah ialah aturan-aturan yang terkait dengan nikah itu sendiri, yakni mencakup syarat, rukun dan aturan-aturan lainnya. Apabila aturan-aturan tersebut, khususnya syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka mut'ah sebagai suatu akad tidak sah atau batal hukumnya.

Hukum-hukum yang akan dikemukakan, pada umumnya diperoleh dari golongan yang menyatakan kehalalan nikah mut'ah, sementara dari aliran yang mengharamkannya tidak diakui sebahagian aturan-aturan tersebut, bahkan dianggap dibuat-buat tanpa landasan. Adapun aturan-aturan yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Ucapan ijab kabul dengan lafal *zawwajtuka* (saya peristerikan kamu), *ankahtuka* (saya menikahi kamu), atau lafal *matta'tuka* (saya memutahi kamu).

Ketiga lafal akad itu, masing-masing dapat digunakan dalam nikah mut'ah tanpa ada perbedaan, sedang bagi kabul hanya disyaratkan mengucapkan lafal-lafal yang menyatakan kerelaan menerima ijab tersebut. Seperti lafal *qabiltu* (saya terima), atau lafal *raditu* (saya merestuinnya dan lafal-lafal lainnya.¹²

2. Calon isteri hendaknya seorang muslimah atau Ahl al-Kitab. Akan tetapi, yang lebih diutamakan adalah wanita saleh yang selalu menjaga kehormatannya. Tampaknya aturan tersebut tidak dikemukakan secara

¹²Al-Imam al-Hāj Aqārūn Allah al-Muwassawniy, *Tahrir al-Wasilah* (t.t.; Muassasah Matbu'ah Dar al-'Ilm, t.th.), h. 289.

tegas, sebab, pada kesempatan lain, kaum Syiah membolehkan nikah mut'ah dengan wanita pezina, dan orang kafir sekalipun. Bahkan perkawinan mut'ah dengan orang-orang yang seperti itu lalu diinsafkan, maka akan diperoleh pahala.

3. Mas kawin harus ada dan boleh dipersaksikan dan boleh juga tidak. Sedangkan persoalan kadarnya didasarkan atas suka sama suka, walaupun segenggam gandum. Mas kawin tersebut mesti disebutkan dalam akad, dan kalau tidak dianggap batal.¹³

4. Batas waktu harus jelas, seumpamanya sehari, seminggu atau sebulan, pokoknya batasan waktu harus dinyatakan secara tegas dalam akad.¹⁴

Akan tetapi, jika suatu akad mut'ah tidak disebutkan maharnya, cuma batas waktunya, maka akad tersebut dianggap batal. Tetapi, kalau sebaliknya, yakni disebutkan maharnya sedang batas waktunya tidak, maka perkawinan tersebut akan berubah menjadi nikah biasa.¹⁵

Penjelasan yang dikemukakan dipahami bahwa lafal akad yang umumnya digunakan dalam ijab mut'ah ada tiga, yaitu lafal *nakaha*, *zawwaja*, dan lafal *matta'a*. Menurut penulis hanya dua lafal yang dapat mengubah status nikah mut'ah menjadi nikah permanen, yaitu lafal *nakaha* dan lafal *zawwaja*. Sebab, memang kedua lafal itu umumnya digunakan dalam ijab nikah permanen, cuma bedanya dalam nikah permanen tidak disertai dengan batasan waktu. Sedang lafal *matta'a*

¹³Al-Hamdaniy, *loc. cit.*

¹⁴Lihat Sayyid Sâbiq, *I'iqh al-Sunnah*, jilid II (Cet. VII; Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy, 1985), h. 44.

¹⁵*Ibid.*

khusus digunakan pada nikah mut'ah. Oleh karena itu, jika seseorang hendak melaksanakan nikah mut'ah tetapi tidak diiringi sebutan batasan waktu, maka tiada pilihan lain kecuali akad menjadi batal. Selain dari itu, antara lafal *nakaha* dan lafal *zawwaja* mengandung makna dan tujuan yang berbeda, sehingga konsekuensinya pun juga berbeda.

Di samping ketepatan tersebut, didapati pula keunikan-keunikan hukum nikah mut'ah, yaitu antara lain:

- a. Kebolehan melangsungkan akad nikah tanpa wali dan saksi
- b. Tidak ada talak sebelum nikah berakhir
- c. Memiliki iddah dua kali haid; dan
- d. Tidak ada pembebanan nafkah dan tempat tinggal.¹⁶

Bagi kaum Syiah Imamiyah yang mengakui kehalalan nikah mut'ah, hukum-hukum tersebut justru dipandang sebagai suatu aturan yang istimewa dibanding hukum-hukum (aturan-aturan) dalam nikah dâim. Dikemukakan oleh Murtada Mutahhari bahwa setidaknya ada dua keuntungan yang ada pada nikah mut'ah, tidak ditemukan pada nikah permanen, yaitu :

- 1) Bagi pria maupun wanita secara bersama-sama mengambil keputusan tentang lama dan singkatnya waktu perkawinan, dan jika keduanya menghendaki perpanjangan, hal itupun boleh dilakukannya.

¹⁶Lihat Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan Tentang Nikah Talak, Rujuk dan Kewarisan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 192.

- 2) Suami dan isteri lebih bebas dalam menetapkan ketenteraman dan persyaratan selama dalam perikatan, misalnya, dalam nikah permanen suami mutlak bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan keluarganya, sedang dalam nikah mut'ah tidak mesti demikian, kecuali bila disyaratkan dalam akad. Demikian pula bagi si isteri, ia boleh memilih hamil atau tidak, tergantung dari kesepakatan mereka berdua, sedang dalam nikah permanen, kehamilan merupakan kewajiban yang tak dapat ditawar oleh si isteri.¹⁷

Dengan demikian, perbedaan yang esensial antara kedua bentuk perkawinan itu terletak pada kebebasan menentukan sikap dalam nikah mut'ah. Sementara dalam nikah permanen tidak ditemukan pilihan seperti itu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya nikah mut'ah memiliki spesifikasi yang lain dengan nikah yang disyariatkan secara permanen. Spesifikasi sebagai perbedaan, terlihat pada tiga aspek, yaitu: 1) Aspek motivasi/tujuan; 2) Aspek syarat-syarat; dan 3) Aspek akibat hukum setelah ptusnya perkawinan.

1) Aspek Motivasi/tujuan

Dalam pelaksanaan nikah mut'ah didasari oleh keinginan untuk menyalurkan nafsu seksual untuk sementara waktu, sedang tujuan membina rumah tangga serta menimbulkan kasih sayang secara timbal

¹⁷Lihat Murtada Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*, dialihbahasakan oleh M. Hashem, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 1995), H. 14-15.

balik antar suami isteri secara abadi tidak ditemukan. Sementara dalam nikah yang disyariatkan justru penekanannya bertujuan untuk membentuk keluarga secara abadi yang terdiri atas anak dan cucu yang dididik secara bersama-sama, ayah dan ibu.¹⁸

Dikemukakan oleh Al-Gazaliy bahwa yang lebih utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.¹⁹ Tujuan seperti itu, tampaknya berbeda dengan tujuan yang ada dalam nikah mut'ah. Bahkan sekiranya tujuan tersebut dikehendai oleh sang suami, maka terlebih dahulu dimufakatkan dengan isteri, dan kalau hal itu tidak dikehendaki oleh isteri, maka tidak ada paksaan untuknya. Dengan demikian, mut'ah sebagai ikatan perkawinan semata-mata bertujuan untuk memperoleh kesenangan seksual, sedang aspek lain seperti yang dicita-citakan dalam nikah dâim tidak tercermin di dalamnya.

2) Aspek Syarat-syarat

Seperti telah dikemukakan bahwa dalam nikah mut'ah terdapat syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip nikah permanen, seperti pembatasan masa perkawinan. Hal tersebut merupakan syarat mutlak kasahihan nikah mut'ah. Jadi, perceraian otomatis adanya, sementara perceraian teramat dibenci oleh Allah swt. Karena itu, kelaggengan ikatan perkawinan seharusnya dipertahankan untuk selama-lamanya sebagaimana termaktub dalam nikah dâim.

¹⁸Lihat Mamoud Syaltout, *Fatwa-fatwa*, jilid II, diterjemahkan oleh A. Gani Bustani (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 32.

¹⁹Lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazâlî, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, jilid II (Cet.III; Bairut: Dâr al-Fikr, 1991), h.25

Selain dari itu, dalam pelaksanaan nikah permanen disyarat-an sebagai berikut:

- a) Izin wali, jika tidak ada wali, maka izin diserahkan kepada penguasa (*wali hâkim*).
- b) Kerelaan wanita, kalau ia *šayyib* (janda) dan telah dewasa (balig) atau dia telah gadis dewasa, tetapi dikawinkan oleh bukan bapak dan neneknya.
- c) Kehadiran dua orang saksi yang adil. Kalau keadilan keduanya tidak jelas, maka tetap dihukumkan sah karena yang amat diperlukan adalah kesaksian...²⁰

Syarat-syarat (a dan c) yang telah dikemukakan tampaknya tidak begitu dipentingkan dalam nikah mut'ah, dengan kata lain, syarat tersebut tidak menghalangi jalannya perkawinan. Padahal, perkawinan tanpa wali dan atau saksi tidak dibenarkan dalam agama, sebagaimana sabda Rasul saw. :

لا نكاح الا بولي وشاهدين ٢١.

Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi.

Pengertian itu dipahami dari kalimat "*lâ nikâha*" (tidak ada perkawinan). Maksudnya bahwa tidak sah suatu perkawinan tanpa wali dan atau saksi. Hal tersebut dipertegas oleh Allah swt. yang ditujukan kepada para wali dalam QS. al-Baqarah (2):221:

²⁰ Abu Hamid Muhammad bin al-Gazâliy, *op. cit.*, h. 40.

²¹ Abu Dâud Sulayman bin al-Asy'asy al-Sajastâniy al-Azadiy, *Sunan Abi Dawûd*, juz II (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 229.

... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ...

Artinya: ... janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman...²²

Menurut ulama, seperti Imam Syafi' dan Imam Malik bahwa "Seandainya mereka tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan ayat di atas tidak ada artinya".²³ Jadi kehadiran para wali dan para saksi merupakan syarat mutlak kesahan suatu perkawinan.

Dalam syarat tersebut ditemukan pula syarat yang bersifat longgar, di mana seorang suami tidak dibebani nafkah dan tempat tinggal, kecuali disyaratkan dalam akad. Tetapi, pada nikah permanen justru merupakan tanggung jawab yang tak ditawarkan bagi suami. Adapun persoalan banyak atau sedikit, dibantu oleh si isteri atau tidak, kesemuanya terpulang kepada keluarga tersebut tanpa dicampuri oleh syarat nikah permanen. Yang jelas, suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

3) Aspek akibat hukum setelah putus perkawinan

Sebagaimana telah termaktub bahwa suami dan isteri tidak saling mewarisi, iddah wanita dua kali haid, tidak ada nafkah iddah dan seorang suami tidak mesti berstatus ayah terhadap anaknya. Spesifikasi tersebut mencirikan perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam nikah permanen.

a) Tidak saling mewarisi

²² Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 53-54.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1996), h. 202.

Dalam masalah ini, tampak perbedaan nikah mut'ah dengan nikah permanen, oleh karena, dalam nikah permanen disyariatkan suami isteri saling mewarisi. Allah swt. berfirman QS. al-Nisa (4): 12, sebagai berikut:

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كنّ لهنّ ولد فلکم الربع ...

Artinya: Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat²⁴

Dalam ayat lain dikemukakan pula :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون ...

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan kaum kerabat Kami jadikan pewaris-pewarisnya...²⁵

Dari dua ayat Alquran di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan secara permanen mengakibatkan hukum waris-mewarisi antar suami isteri, sedangkan dalam nikah mut'ah tidaklah seperti demikian.

b) Iddah wanita

Iddah dalam nikah mut'ah adalah dua kali haid bagi wanita yang masih haid, dan yang tidak, hanya empat puluh lima hari saja.

Sedang iddah dalam nikah sah ada empat macam bentuknya, yaitu:

- (1) Wanita diceraikan hidup iddahnya tiga kali haid bagi yang tidak hamil.²⁶

²⁴ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 166

²⁵ *Ibid.*, h. 122-123.

²⁶ Lihat QS. al-Baqarah (2): 228 dalam Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 55

- (2) Tidak diceraai hidup dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan.²⁷
 - (3) Wanita diceraai mati, iddah mati iddahnya empat bulan sepuluh hari bagi yang masih haid,²⁸ dan
 - (4) Yang tidak haid lagi, idahnya tiga bulan.²⁹
- c) Tidak ada nafkah iddah

Tampak pula perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah sah dalam hal jaminan nafkah selama proses iddah. Dalam nikah mut'ah jaminan tersebut tidak ada setelah terjadi perceraian. Sedangkan dalam nikah sah jaminan nafkah iddah tetap terbebaskan kepada suami sampai proses talak terlewati. Kewajiban tersebut didasarkan pada firman Allah swt. QS. al-Talaq (65): 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيّقوا عليهنّ وان كنّ اولات حمل فانفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ . . .

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin³⁰

- d) Ayah tidak mesti berstatus ayah

Dimaksudkan adalah bahwa seorang laki-laki yang telah melakukan nikah mut'ah kepada seorang perempuan, maka lelaki tersebut tidak mesti berstatus ayah tergantung pada perjanjian ketika akad

²⁷Lihat QS. al-Talaq (65): 4, *ibid.*, h. 946.

²⁸Lihat QS. al-Baqarah (2): 234, *ibid.*, h. 57.

²⁹Lihat QS. al-Talaq (65): 4, *loc. cit.*

³⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 946.

dilangsungkan, apakah anak itu mengikut kepada bapaknya atau ibunya, demikian pula masalah pendidikan atau tanggung jawabnya.

Tetapi, pada nikah sah, anak sudah jelas di bawah asuhan tanggung jawab ayahnya, baik tanggungan nafkah, maupun tanggungan pendidikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah sebagai nikah yang diperselisihkan memiliki aturan-aturan atau hukum-hukum yang berbeda dengan nikah dâim, terlihat adanya beberapa syarat yang tidak ditemukan dalam nikah mut'ah. Meskipun demikian, bagi pihak Syiah aturan itu bukanlah suatu kekurangan melainkan kekhususan yang ada pada nikah mut'ah. Akan tetapi, aturan-aturan tersebut tampaknya memudahkan laki-laki dan sebaliknya memberatkan perempuan sebab, seperti dihilangkannya jaminan nafkah, tempat tinggal, nafkah iddah dan sebagainya.

C. Latar Belakang Terjadinya Nikah Mut'ah

Jika dibuka lembaran sejarah Arab, maka dijumpai suatu bentuk kehidupan yang tidak teratur, populernya disebut kehidupan jahiliah. Bangsa Arab ketika itu, cenderung aktivitas-aktivitas mereka tidak berlandaskan dengan hukum. Kekuatan yang dipuja-puja merupakan unsur kebenaran yang utama, siapa yang kuat merekalah yang menang. Sedang kaum yang lemah tak dapat berbuat apa-apa kecuali meratapi nasib yang menimpanya.

Termasuk kaum lemah yang mendapatkan penindasan adalah kaum wanita. Martabat mereka dipandang amat rendah, mereka diserupakan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan dan diwariskan seperti harta pusaka.³¹

Selain dari itu, kejahatan perzinaan dan pemilikan wanita teramat menonjol karena aturan-aturan dalam hal ini belum ada, dan walaupun ada tetap tidak digubris dan tidak pula Islami. Oleh karena itu, wanita tidaklah lebih sebagai pemuas nafsu lelaki, sehingga dimana-mana terdapat tradisi pemilikan wanita-wanita yang berlebihan.

Manurut riwayat Al-Dâraqutniy, dari Abu Hurayrah, dari Aisyah bahwa bentuk akad yang direalisir pada masa itu, sebagai berikut:

1. *Nikah al-nas al-yawm* (Perkawinan Pinangan), yakni seorang laki-laki meminang seorang perempuan dengan cara menyerahkan sejumlah mahar kepada orang tuanya atau kepada walinya. Atas persetujuan pihak wanita (orang tua/wali), maka dilaksanakanlah perkawinan.

2. *Nikah al-istibda'* (perkawinan pinjam), yakni seorang suami menyerahkan istrinya kepada seorang laki-laki setelah ia suci dari haid untuk hidup bersama. Ketika isterinya yang telah diserahkan ternyata hamil, maka suami pertama menyatu kembali dengannya. Perkawinan seperti itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menyelamatkan bibit seorang bangsawan yang dinilai cerdas (bibit unggul).

³¹ Pada masa jahiliyah, wanita merupakan harta suaminya atau ayahnya dan jand-janda seorang suami jatuh kepada anaknya laki-laki sebagai pusaka, seperti tiap bagian warisan lain dari ayah. Perkawinan antara anak tiri dengan ibu tiri disebut *nikah al-makt* (perkawinan keji) dalam Islam. Lihat Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delhi, 1978), h. 228.

3. Sejumlah laki-laki (di bawah sepuluh orang) menggauli wanita dengan cara bergiliran. Pada saat wanita tersebut diketahui hamil, maka orang-orang yang telah menggaulinya berkumpul dan dipilih salah satu diantara mereka dari si hamil untuk bertindak selaku ayahnya.

4. Perempuan-perempuan yang tidak menolak ajakan setiap lelaki yang datang kepadanya, atau wanita tuna susila.³²

Ditemukan pula dalam riwayat lain bahwa ketika itu ada pula bentuk percampuran yang disebut:

1. *Nikah al-khadn* (Nikah Pergundikan).

Tradisi perkawinan pergundikan di kalangan bangsa Arab tidak dianggap suatu keaiban sepanjang perbuatan itu tidak dilakukan secara terang-terangan. Hal itu telah disinggung oleh Allah dalam QS.al-Nisa (4):25, berikut ini:

... ولا متخذات اخدان ...

Artinya: Dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...³³

2. *Nikah al-badl* (Nikah Tukar Menukar Istri).

Yang dimaksud *nikah al-badl* adalah seorang laki-laki (suami) menyerahkan istrinya kepada orang lain dan ia pun mengambil isteri orang tersebut dengan menambahkan upah kepadanya.³⁴

³²Disadur dari Sayyid Qutub, *Li Zilail al-Qur'an*, jilid II (Cet. XVII; Bairut; Dar al-Masyriq, 1992), h. 624-625.

³³Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 121.

³⁴Disadur dari Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 8.

Selain bentuk-bentuk akad di atas, ditemukan pula suatu kebiasaan bangsa Arab yang disebut nikah berjangka (*nikah al-muaqqat*), populernya disebut nikah mut'ah, yakni diperisterikannya seorang wanita untuk beberapa hari kemudian diceraikan menurut ketentuan-ketentuan.³⁵

Bentuk-bentuk akad yang telah disebutkan, satu di antaranya mendapat restu dalam Islam, yaitu bentuk perkawinan pinangan. Perkawinan itu direstui karena dianggap mendekati prinsip-prinsip ajaran Islam. Di dalamnya terdapat akad (ijab-kabul), mahar serta persetujuan wali oleh kedua belah pihak. Bentuk inilah dilestarikan dalam Islam, lazimnya disebut nikah permanen, nikah sah atau nikah resmi.

Selain dari bentuk-bentuk tersebut dipandang akad yang bertentangan dengan ajaran Islam sebab pada umumnya cenderung ke arah prostitusi, di mana kenikmatan seksual lebih diutamakan, sementara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral tak terindahkan. Padahal tujuan-tujuan itulah yang hendak dipertahankan dalam syariat perkawinan.

Pada saat memuncaknya dekadensi moral Arab jahiliah diutuslah Nabi Muhammad saw. untuk meluruskan tradisi-tradisi yang menyimpang dari kebenaran. Dalam hal ini termasuk mengoreksi macam-macam akad, kecuali nikah pinangan.

Dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam, tampaknya Nabi saw. menempuh sistem *step by step* (selangkah demi selangkah) atas sebaha-

³⁵ Lihat Syed Ameer Ali, *op. cit.*, h. 227; 'Abd al-Husayn Syarafuddin al-Musâwiy, *al-Fusul al-Muhimmah fi Ta'rif al-Ummah*, dialihbahasakan oleh Mukhlis, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunni-Syiah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1989), h. 87.

gian ajaran-ajaran Islam, khususnya dalam nikah mut'ah. Menurut riset Dr. Muhammad Muslehuddin, mut'ah ini merupakan tradisi jahiliyah yang populer di kalangan bangsa Arab sejak abad IV A.D.³⁶

Terlihat perzinaan dan praktek-praktek prostitusi telah lama melekat dalam kehidupan umat, maka menghapusnya secara total dipandang pikulan yang amat memberatkan. Karena itu, pada awal perkembangan Islam nikah mut'ah masih saja ditolerir sebelum stabilnya syariat Islam, sebagaimana riwayat berikut:³⁷

عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شياؤه...
Artinya: Dari Ibn Abbas berkata bahwa nikah mut'ah pada awal Islam bermula ketika seorang pria datang ke suatu daerah tidak ada yang mengenalnya, maka dia mengawini seorang wanita selama priode perkiraannya di sana, sehingga wanita tersebut memelihara kesenangan dan harta bendanya.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawiy, rahasia dibolehkan mut'ah karena masyarakat Islam masih dalam peroses menuju suasana keislaman, populernya disebut *masa transisi*.³⁸

Akan tetapi, menjelang hijrah Rasul saw. dari Mekah ke Madinah turunlah ayat yang intinya bertentangan dengan nikah mut'ah, akan tetapi, belum dinyatakan keharamannya secara tegas, yakni QS. al-Mu'minun (23): 5-7:

³⁶ Muhammad Muslehuddin, *Mut'a (Temporary Marriage)*, h. 26; lihat pula "Mut'a" dalam H. A. R. Gibb (ed.), *Shoter Encyclopedia of Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1953), h. 418.

³⁷ Abu 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Sawrah al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy*, juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 295-296.

³⁸ Muhammad Yusuf al-Qardawiy, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, diterjemahkan oleh Muammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 257.

والذين هم لفروجهم حفظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فاوئلك هم العادون .

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.³⁹

Pada ayat di atas mengarahkan bahwa hubungan seksual yang dibolehkan dalam agama hanya pada dua tempat, yaitu kepada isteri dan budak-budak belian yang diperoleh dari peperangan, dan yang lainnya tidak dibenarkan. Tetapi, dipihak Syiah menanggapi ayat itu tidak bertentangan dengan mut'ah. Sebab, wanita yang diperoleh lewat akad yang sah (akad mut'ah) dihukumkan sebagai isteri. Adapun tentang adanya nafkah, kewarisan dan sebagainya hanyalah aturan yang ada pada nikah dâim, sedang mut'ah, tidak.⁴⁰ Pernyataan yang dikemukakan Syiah ini ada benarnya, namun demikian, perlu kita kembali memperhatikan makna isteri itu sendiri.

Secara hukum diakui bahwa semua wanita yang diperoleh lewat akad sah disebut isteri. Tetapi, apakah wanita yang diperoleh lewat nikah mut'ah dapat menduduki jabatan tersebut, atau tidak. Sebab, secara bahasa boleh-boleh saja karena ia berfungsi selaku pasangan dari suaminya.⁴¹ Namun menurut hakekat, tampaknya istilah itu tidak tercakup dalam nikah mut'ah. Dalam hal ini, isteri adalah pasangan yang siap

³⁹ Departemen Agama RI. *op. cit.*, h. 526.

⁴⁰ Lihat Syarafuddin al-Musâwiy, *op. cit.*, h. 95.

⁴¹ Lihat Louis Ma'luf, *op. cit.*, h. 310.

mendampingi suami untuk selamanya, tidak dibatasi oleh waktu, siap melahirkan keturunan dan siap membantu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan isteri yang diperoleh melalui nikah mut'ah tidaklah lebih dari pemuas nafsu untuk sementara waktu. Karena itu, istilah isteri lebih cocok disandang oleh wanita yang diperoleh dari nikah dâim.

Dengan demikian, ayat tersebut dipandang lebih akurat jika yang dimaksudkan nikah dâim. Di mana wanita dalam nikah mut'ah tidak berfungsi sebagaimana layaknya seorang isteri, tetapi ia identik dengan barang upahan. Sebab itu, secara tidak langsung menolak mut'ah dan mengarahkan ke perkawinan yang akan disempurnakan, yakni nikah dâim.

Sesudah Rasul saw. bersama umatnya berada di kota Madinah, pada tahun-tahun pertama mereka tidak merasa aman akibat intimidasi kaum Quraisy Mekah. Pada intinya, mereka dihalang-halangi untuk menyebarkan ajaran Islam, akibatnya peperangan tak terelakkan. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam banyak-banyak mengadakan perjalanan jauh dan menghadapi perang *fî sabîlillah* dan mut'ah pun masih direalisasikan dalam kondisi darurat. Hal tersebut merupakan penderitaan yang cukup menyakitkan karena di samping maut senantiasa mengintai mereka, pun dipisahkan oleh anak dan isteri. Di antara mereka sebahagian imannya lemah, dan mereka itulah yang dikhawatirkan akan berbuat zina karena merajalelanya perzinaan, sedang yang memiliki iman yang kokoh,

sebahagian mereka tak sanggup lagi menahan syahwat,⁴² karenanya terdorong untuk melakukan pengebirian, seperti dikemukakan dalam hadis berikut ini :

عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : الا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل . . . رواه مسلم . ٤٣

Artinya: Dari Qays, ia berkata saya mendengarkan Abdullah berkata: Kami bereperang bersama-sama Rasul saw. sementara tidak ada wanita yang menyertai kami (isteri-isteri), maka kami berkata, tidakkah berkebiri lebih baik, ternyata Nabi tidak merestui hal itu. Kemudian ia melonggarkan kami dengan cara mengawini wanita dengan mahar sehelai pakaian sampai kepada masa tertentu...

عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضى الله عنهم قالا كما فى جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا .

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa' ra., ia berkata kami dalam ketentaraan, ketika itu Rasul saw. mendatangi kami, lalu ia bersabda bahwa didizinkan kepada kalian melakukan nikah mut'ah, maka kami melakukannya.

Dengan demikian, pada prinsipnya kebolehan umat Islam melakukan mut'ah karena undang-undang perkawinan belum sempuna, sedang kaum muslimin berada dalam kondisi yang terpaksa, yakni dalam peperangan dan perjalanan jauh yang tak memungkinkan mereka kembali dalam jangka waktu yang singkat. Dispensasi itu, tampaknya merupakan

⁴² Bagi mereka yang tidak ikut berperang dipeselihkan oleh ulama, ada yang membolehkannya kala itu, karena alasan tidak semua hadis yang meriwayatkan mut'ah mesti disertai suasana perang. Sedang yang lain mengharamkannya karena umumnya hadis-hadis yang bersinggungan mut'ah dirangkaikan dengan kondisi perang.

⁴³ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim*, juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 1022.

⁴⁴ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhâriy, *Sahih al-Bukhâriy*, juz III (t.tp.; Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h. 246.

jenjang untuk menuju sempurnanya undang-undang perka-winan menurut tuntunan Islam. Sedang orang-orang yang tidak demikian (mukim) tentulah tidak dibenarkan untuknya.

Menurut Abd Al-Rahman al-Ahdal bahwa pada dasarnya nikah mut'ah dibolehkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Umat Islam sedang berperang di jalan Allah
- b. Wanita saat itu masih sangat sedikit, sehingga ada kesulitan untuk melakukan nikah mut'ah
- c. Kebutuhan untuk kawin sudah sangat mendesak.⁴⁵

Ketiga faktor di atas, tampaknya mengiringi umat Islam sampai ke detik-detik kesempurnaan ajaran Islam. Olehnya itu, nikah mut'ah sebagai nikah yang diperselisihkan berkali-kali dibolehkan, tergantung situasi dan kondisi yang melilit mereka.

Dikemukakan dalam *Tafsîr al-Qurtubiy* bahwa nikah mut'ah dibolehkan dan diharamkan pada tujuh tempat atau peristiwa, yaitu: (1) Pada permulaan Islam; (2) Perang Awtas; (3) Perang Khaibar; (4) Perang Tabuk; (5) Haji Wada'; (6) Peristiwa 'Umrah al-Qada; dan (7) Pada masa Pemebebasan Kota Mekah.⁴⁶ Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Zakaria al-Nawawiy, mut'ah terjadi hanya dua kali saja, yaitu: (1) Pada Perang Khaibar dan dibatalkan pada masa itu juga; dan (2) Saat Pembebasan Kota Mekah.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad 'Abd al-Rahman Syamîlah al-Ahdal, *Nikâh al-Mut'ah* (Cet. I; Damsyiq: Muassasah al-Khâfiqîn wa Maktabatuhâ, 1983), h. 251.

⁴⁶ Al-Qurtubiy, *op. cit.*, h. 131.

⁴⁷ Lihat Al-Nawawiy, *Syarah Sahih Muslim*, juz IX (Cet. III; Bairut: Dâr al-Fikr, 1978), h.

Dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka pelaksanaan nikah mut'ah dapat dikronologiskan sebagai berikut:

- Pada awal Islam hukum nikah mut'ah dibolehkan sekalipun motivasinya berbeda dengan nikah yang disyariatkan.
- Turunnya QS. al-Mu'minun (23): 5-7 merupakan isyarat akan dilarang nikah mut'ah, sehingga dibolehkan secara *rukhsah* karena perang-perangan, dan setelah *rukhsah* darurat selesai pun dicabut kembali.
- Pada masa Pembebasan Kota Mekah keharaman nikah mut'ah kembali ditegaskan.⁴⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah salah satu bentuk akad yang telah lama dikenal oleh Arab jahiliah sebelum Islam, diperkirakan abad ke-4 A.D.

Nikah mut'ah, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang disyariatkan dalam Islam, yakni nikah sah. Hal itu terlihat dari aspek motivasi/tujuan, aspek syarat-syarat dan aspek akibat hukum setelah perceraian. Meskipun demikian, pada awal perkembangan Islam praktek nikah mut'ah masih ditolerir. Akan tetapi, menjelang hijrah Rasul ke Madinah nikah itu telah diisyaratkan kebatalannya. Namun setelah hijrah, nikah itu kembali diperaktekkan oleh sahabat karena faktor keterdesakan kebutuhan biologis, lagi pula undang-undang perkawinan belum tergarap secara sempurna, maka pada akhirnya nikah itu diharamkan untuk jangka waktu tak yang tak terbatas.

⁴⁸ Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bab IV.

Akan tetapi, dari pihak Syiah menganggap bahwa meskipun nikah tersebut bertentangan dengan aturan-aturan nikah dâim, namun hal tersebut bukanlah indikasi atas diharamkannya, melainkan merupakan nikah pendamping yang dapat berlangsung pada waktu dan tempat-tempat tertentu.

STUDI KRITIS TERHADAP DALIL-DALIL NIKAH MUT'AH

A. Nikah Mut'ah dan Alquran

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, terlebih dahulu ditilik apakah ada ayat atau hadis yang berkaitan langsung dengan pokok persoalan, atau tidak. Sebab, telah menjadi keyakinan bagi umat Islam bahwa keduanya merupakan sumber utama dalam *istidlâl*. Sedang Sunnah Nabi berperan sebagai penjelasnya, dan kadang kala sebagai hukum asal terhadap masalah-masalah yang tidak disinggung di dalamnya.¹

Nikah mut'ah sebagai pokok persoalan, merupakan nikah yang diperselisihkan sumber dan kedudukan hukumnya. Seperti yang dianut oleh mazhab Sunni, nikah itu dibolehkan berdasarkan dispensasi Nabi saw., bukan atas dasar petunjuk Alquran. Kemudian setelah berkali-kali dibolehkan barulah diharamkan kembali, juga berdasarkan dispensasinya untuk selama-lamanya.

Berbeda pendapat Syiah, mereka menyatakan nikah mut'ah disyariatkan melalui Alquran dan tak satu ayat pun yang menasakhnya serta diberlakukan oleh Sunnah Nabi saw. untuk waktu yang tak terbatas.²

¹Lihat Muhammad Idris al-Syafi'iy, *al-Risâlah* (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 88-89; Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-I'iqh* (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabî, t.th.), h.112.

²Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulainiy, *I'uru' al-Kâfiy*, juz V (Cet. III; Bairut: Dar al-Adwâ, 1985), h. 449.

1. Referensi Nikah Mut'ah dalam Alquran

Menurut keyakinan mazhab Syiah, ayat yang menyatakan kebolehan nikah mut'ah termaktub dalam firman Allah QS. al-Nisa (4): 24 sebagai berikut :

والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما .

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.³

Menurut pemahaman Syiah, lafal *istamta'tum* yang tercantum pada ayat tersebut mengandung makna nikah mut'ah. Yakni perkawinan yang dilaksanakan secara terputus, lazimnya disebut '*aqd al-inqitâ'*', (perkawinan yang terbatas dengan waktu tertentu).⁴ Mereka mengartikan lafal ayat *فما استمتعتم به منهن* (Apabila kamu memut'ahi salah seorang di antara mereka). Dengan pengertian itulah dipahami bahwa lafal *istamta'tum* menunjuk disyariatkannya nikah mut'ah.

³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 120-121.

⁴Muhammad Husayn Ali Kâsyif al-Gitâ, *Asl al-Syi'ah wa Usûluhâ*, juz IV (t.t.: Maktabah al-Tsaqâfah al-Islâmiyah, t.th.), h. 101-102.

Untuk menguatkan argumentasi tersebut, mereka mengacu pada pendapat para mufassir berikut ini:

- a. Abd. Razak, dari Aṭa', ia berkata bahwa ayat 24 dalam surah al-Nisâ menjelaskan keberadaan batas waktu dalam nikah, ialah nikah mut'ah.⁵
- b. Abu Baṣîr berkata, saya bertanya kepada Abu Ja'far as. tentang nikah mut'ah, lalu beliau menjawab mut'ah itu diturunkan melalui Alquran (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).⁶
- c. Muhammad bin Husayn, dari Al-Sâdiy, ia berkata bahwa ayat ini (4:24) adalah ayat mut'ah, yakni seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat dan waktu tertentu.⁷
- d. Demikian pula salah seorang Mufassir Syiah, Al-Tabatabaî menjelaskan bahwa ayat itu menunjuk pada nikah mut'ah. Pengertian itu ditilik dari lafal yang mendahuluinya (ان تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ / mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian ukan untuk berzina). Jadi, posisi *fa* pada *famastam-ta'tum* berfungsi sebagai *tafri' juz'iy* atas *kulliy* (sebagian atas keseluruhan).⁸

⁵ Abd al-Rahman Jalâl al-Din al-Suyûṭiy, *al-Dur al-Maṣûr fî Tafsîr al-Ma'tsur*, jilid II (Cet. I; Bairut, Dâr al-Fikr, 1983), h. 484.

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub, *op. cit.*, h. 448.

⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Ṭabariy, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân*, juz V (Cet. II; Mesir, Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduhû, 1954), h. 12.

⁸ Disadur dari penjelasan Muhammad Husayn al-Ṭabatabaî, *al-Mizân fî Tafsîr Alqurân*, juz IV (Cet. I; Bairut: Muassasah al-A'lamiy li al-Maṭbu'ât, 1991), h. 278.

Pada dasarnya pendapat di atas dirujuk dari sebagian pendapat mufassir kalangan sahabat, seperti Abdullah bin Abbas yang menyambung ayat⁹ "فما استمتعتم به منهن" إلى أجل مسمى (barang siapa bermut'ah salah seorang di antara mereka sampai pada masa tertentu). Namun, penulis melihat bahwa pendapat itu tidak disepakati oleh seluruh sahabat. Di mana sahabat yang lain tidak mengakui atas adanya penambahan bacaan tersebut.¹⁰

Dari perbedaan pendapat tersebut, mazhab Syiah mengokohkan pendapat pertama, sehingga lahirnya pernyataan bahwa dalam surah al-Nisâ terdapat syariat nikah mut'ah. Sedang mazhab Sunni memandang yang lebih rajih adalah pendapat kedua. Seperti dinyatakan oleh Ibn Khuwaiz Mandad bahwa ayat itu tidaklah tepat jika dikatakan membawa arti kebolehan mut'ah karena Rasul saw. telah mengharamkan sebelumnya.¹¹

Terlepas dari kedua pendapat tersebut, penulis lebih awal mengemukakan *munâsabah* ayat, yaitu dengan cara mengaitkan ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nisa (4): 22-23, berikut ini:

⁹Al-Tabariy, *loc. cit.*

¹⁰Lihat antara lain dialog Abu Nadrah dengan Ibn Abbas, yang mana Abu Nadrah kurang setuju atas penambahan bacaan tersebut, lihat dalam Abu Ja'far Muhammad Jarîr al-Tabariy, *Tafsir al-Tabariy*, juz V (Cet. III; Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafa al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduhû, 1954), h. 11-12

¹¹Menurut Ibn Khuwaiz, model akad itu dibatalkan oleh Nabi saw. sebelum diturunkan ayat tersebut di Madinah, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy al-Qurtubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, jilid V (Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr li al-Tabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1987), h. 129.

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
حرمت عليكم امهتكم وبناتكم واخوتكم ...

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; ...

Jika diperhatikan ayat-ayat di atas, pada intinya menjelaskan wanita-wanita yang haram untuk dikawini dalam nikah dâim, antara lain perempuan yang telah diperisterikan oleh ayah, saudara perempuan dan saudara laki-laki. Perkawinan yang dikomentari pada ayat itu adalah nikah dâim, sedang ayat (4:24) fungsinya sebagai *ma'tûf* (mengikut) dari ayat 22-23 sebelumnya. Oleh karena kedudukannya *ma'tûf* pada ayat yang membicarakan nikah dâim, maka ayat (4:24) pun juga demikian, yakni mempunyai kesetaraan hukum, dalam arti, pokok persoalan apapun yang dikomentari pada dua ayat sebelumnya, maka persoalan itu pula yang dimaksudkan pada ayat sesudahnya (nikah dâim).

Dalam ayat 22, secara jelas Allah swt. menggunakan lafal *nakaha* (nikah). Pada prinsipnya penggunaan lafal tersebut digunakan pada nikah permanen, baik lafal itu disebutkan dalam Alquran maupun Sunnah Nabi saw. Oleh karena ayat 22-23 membicarakan nikah permanen, maka keseluruhan ayat (4:24) juga demikian adanya. Aka tetapi, jika ayat itu (4:24) dipahami menunjuk kepada kepada nikah mut'ah, berarti seakan-akan dipersamakan makna lafal *nakaha* dengan *mata'a*

¹²Departemen Agama, *loc.cit.*

(bersenang-senang), padahal jelas-jelas ayat itu menyatakan *wa lâ tankihû*, bukan *wa lâ tamatta'û*. Di samping itu, dalam ayat dikatakan (dan dihalalkan *واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبغوا باموالكم محصنين غير مسافحين*

tamu untuk dikawini bukan untuk berzina). Bagian ayat ini menjelaskan bahwa hubungan seksual yang terjadi antara dua jenis kelamin dapat terlaksana dengan dua macam cara, yaitu: (1) *al-Ihsân*, yaitu pemeliharaan kasucian diri dari keterjerumusan pada hal yang haram,¹³ dan (2) *al-Sifâh*, yakni meliputi percampuran antar laki-laki dengan perempuan yang tidak sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya.¹⁴

Jika diperhatikan nikah mut'ah secara seksama, maka ditemukan di dalamnya prinsip-prinsip yang bertentangan dengan hakekat nikah permanen (nikah yang disyariatkan), baik dari aspek motivasi, syarat-syarat maupun akibat hukum setelah perceraian. Karena itu, nikah ini kurang tepat jika dipandang sebagai nikah yang dapat membentengi seseorang sehingga dapat terhindar dari kekejian zina. Di mana nikah itu dimotivasi oleh unsur pemenuhan nafsu syahwat, semen-tara keinginan untuk membentuk rumah tangga jauh darinya. Seperti, dinyatakan oleh Ja'far al-Sâdiq ketika ditanya, bahwa bagaimana esensi nikah mut'ah itu.

¹³Muhammad Yusuf, dikenal Abû Hayyân al-Andalusîy al-Garnâtiy, *al-Bahr al-Muhîṭ fi Tafsîr*, juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), h. 589.

¹⁴*Sifâh* Menurut bahasa ialah menumpahkan air. Dalam hal ini, ulama menyebutnya zina karena ditumpahkannya air (mani) dalam tempat yang diharamkan oleh agama. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm* (Cet. XXVIII; Bairut, Dar al-Masyriq, 1986), h. 336-337; lihat pula pendapat Mujahid dalam Al-Tabariy, *loc. cit.*

Ia menjawab المتعة هي الزنا (mut'ah itu pada hakekat-nya adalah zina).¹⁵ Jadi, awal pelaksanaan nikah mut'ah termotivasi oleh keinginan melakukan zina. Akan tetapi, mut'ah yang dibolehkan ketika itu atas dasar dispensasi Nabi, di mana umat Islam dalam kondisi terpaksa (*darûrah*) khususnya bagi mereka yang lemah iman. Namun, kebolehan-nya tidak menjamin bahwa hal tersebut adalah halal secara mutlak,¹⁶ karena itu, batasan-batasan tetap ada dan tetap diharamkan pada tempat dan kesempatan lain. Lagi pula, terlihat dikalangan sahabat mayoritas enggan melakukannya, walaupun telah dibolehkan oleh Nabi saw. pada masa darurat itu. Jadi, pemeliharaan diri secara mut'ah kurang relevan dengan istilah *muhsinin* yang sesungguhnya, sebagai-mana yang tercantum pada ayat tersebut.

Istilah *muhsinin*, tampaknya Syiah Imamiyah pun memahami khusus pada nikah dâim, karena diakui bahwa ketetapan hukum *ihsân* hanya dapat terlaksana pada nikah dâim,¹⁷ sedang nikah mut'ah tidak, maka dari pengertian itulah dipahami bahwa nikah dâimlah yang dimaksudkan dalam ayat.

¹⁵ Ibn Hajar al-'Asqalâniy, *Syarah Sahîh al-Bukhâriy; Fath al-Bâriy*, juz IX (Mesir: Dâr al-Bayân li al-Turâs, 1978), h. 78

¹⁶ Kebolehan-nya tidak seperti dengan kehalalan barang yang lain, melainkan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, sehingga tidak semua orang bebas melakukannya. Oleh-nya itu, penulis memakai istilah *boleh* bukan *halal*, berarti seseorang diperhadapkan kepada dua pilihan, yakni boleh melakukan dan boleh juga tidak, akan tetapi meninggalkannya adalah alternatif yang lebih baik dan walaupun dilakukannya tidak berarti melanggar hukum dan tidak pula dianggap suatu aib. Sedangkan halal adalah sesuatu yang tidak memiliki alternatif, melakukan atau meninggalkannya sama saja tidak ada di dalamnya istilah lebih baik karena memang hukum dasarnya halal.

¹⁷ Abu Bakar Ahmad 'Alî al-Râziy Al-Jagâs, *Ahkâm al-Qur'ân*, juz II (Bairut: Dâr al-Mushaf Syarikah Maktabah wa Matba'ah 'Abd al-Rahmân Muhammad, t.th.) h. 180.

Atas dasar itulah, penulis cenderung mengartikan *istamta'tum* (bersenang-senang) dalam nikah permanen karena arti mut'ah melenceng dari pokok persoalan hukum yang dibicarakan.

Pada potongan ayat itu pula, dijelaskan bahwa selain wanita yang telah disebutkan, ada pula wanita yang halal untuk dikawini, tetapi disyaratkan disertai dengan mahar (*ajr*) yang disepakati bersama. Keberadaan potongan ayat itu menegaskan kebolehan kawin secara permanen, dan makna tersebut tidak ada pertentangan dikalangan mufassir.¹⁸ Maka adanya disebutkan *al-istimta'a* merupakan penjelasan atas hukum jima', yang mana wanita (isteri) berhak memperoleh mahar. Sebagaimana dikatakan Al-Qurtubiy "Apabila seseorang bersenggama (dalam nikah sah) satu kali, maka ia wajib memberi mahar (kepada isterinya) secara sempurna jika disebutkan, dan kalau tidak, (mahar) yang sesuai."¹⁹

Dikemukakan pula oleh Al-Jasâs bahwa lafal "*istamta'tum*" menunjuk kepada hubungan seksual yang mewajibkan pembayaran mahar dalam nikah dâim. Pemahaman itu diperoleh dari kata-kata "menginginkan kesucian dan bukan hawa nafsu"²⁰ yang merupakan indikasi bahwa pernikahan yang dimaksud adalah nikah dâim, bukan mut'ah yang hanya menginginkan kelezatan seksual.²¹

¹⁸ *Ibid.*, h. 179.

¹⁹ Al-Qurtubiy, *op. cit.*, h. 129.

²⁰ Departemen Agama RI., *loc. cit.*

²¹ Al-Jasâs, *op. cit.* (juz III), h. 95.

Jadi, penyebutan lafal itu (*istamta'tum*) berfungsi untuk menegaskan hak mahar bagi wanita sebagai balas jasa secara sempurna, yang apabila telah terjadi percampuran, tetapi, jika belum, maka si isteri cukup separuhnya saja. Sehingga, apabila terjadi cerai hidup, si isteri hanya berhak memperoleh separuh dari harta yang ditinggalkan.

Selain itu, kaum Syiah berargumentasi bahwa lafal *ajr* relevansinya nikah mut'ah, dan lafal *mahr* dapat digunakan pada nikah permanen. Akan tetapi, menurut Al-Nâzhim lafal itu merupakan salah satu nama lain dari istilah mahar, seperti *nihlah*, *faridah*, *ajr* dan sebagainya.²² Karena itu, pernyataan tersebut tampaknya kurang berseesuaian dengan firman Allah, antara lain seperti berikut ini:

... فانكحوهنّ باذن اهلهنّ وآتوهنّ اجورهنّ ...

Artinya: ... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah mas kawin mereka menurut yang patut...²³

Jadi, pada prinsipnya lafal itu merupakan salah satu lafal yang digunakan dalam menyatakan mahar. Dan tampaknya macam-macam lafal itu digunakan dalam nikah dâim, termasuk lafal *ajr* itu sendiri.²⁴

Uraian di atas, dikuatkan pula oleh sambungan ayat **ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات** (dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini

²²Dalam Alquran al-Karîm, istilah mahar mempunyai delapan nama, antara lain: *sadâq*, *mahr*, *nihlah*, *faridah*, *hubbâ*, *ajr*, *'aqr* dan *tûl*, Al-Khatîb al-Syarbîniy, *Mugnâ al-Muhtâj*, juz III, h. 220.

²³Depatemene Agama RI., *op. cit.*, h. 121.

²⁴Lihat penggunaan lafal *ajr* pada QS. al-Nisâ (4): 25.

wanita merdeka lagi beriman)²⁵ yang mana menjelaskan hukum-hukum nikah permanen, bukan mut'ah karena pada hakekatnya tidak termasuk kategori nikah. Pernyataan tersebut dikemukakan pula dalam dialog berikut ini:

سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح هي ام نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح...²⁶

Artinya: Saya ('Ammar mawlâ Al-Syarîd) bertanya kepada Ibn Abbas tentang mut'ah, apakah termasuk *sifah* atau nikah? Ia menjawab bukan *sifah* dan bukan pula nikah...

Nikah mut'ah tidak pula disebut *sifah* ketika dibolehkan oleh Nabi saw. Dalam hal ini, beliau memberikan dispensasi berarti secara hukum boleh menurut agama. Jalinan seksual seperti itu tidak dinamakan *sifah*, akan tetapi, jika kebolehan itu dicabut oleh Nabi dengan lafal "*nahâ/dilarang*", maka kedudukan hukumnya berubah menjadi haram, dan ketika itu pula dinamai *al-sifah*. Demikian pula mut'ah tidak patut dinamai nikah, jika ditilik dari aspek tujuannya, sebab term nikah sebagaimana yang disyariatkan dalam Alquran jauh berbeda dengan hakekat mut'ah. Karena itu, keberadaan mut'ah didasarkan pada dispensasi Nabi saw.

Dengan demikian, lafal *ajr* ternyata bukan hanya digunakan pada nikah mut'ah, melainkan juga pada nikah permanen, dan istilah itu merupakan salah satu dari penamaan mahar yang diberikan kepada wanita yang hendak/sudah dikawini.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Al-Ahdal, *Nikâh al-Mut'ah* (Cet. I; Damsyiq: Muassasah al-Khâfiqîn wa Maktabatuhâ, 1983), h. 249-250.

Dari itulah, penulis cenderung memahami lafal *istamta'tum* bermaknakan nikah dâim, walaupun mut'ah tujuan utamanya untuk memperoleh kesenangan, tetapi *intafa'tum* (mengambil manfaat) dan *talazzaztum* (menikmati kelezatan) jima' juga dapat dirasakan dalam nikah sah.²⁷

Tujuan "kesenangan seksual" agaknya merupakan suatu kekeiruan jika dipahami hanya terdapat pada nikah mut'ah,²⁸ walaupun kenikmatan tersebut bukan inti/tujuan perkawinan, tetapi, salah satu bentuk kenikmatan yang mutlak diperoleh dalam ikatan perkawinan, baik perkawinan secara sah maupun tidak. Karena itu, kurang bijaksana jika dikatakan bahwa lafal *istamta'a* mengandung arti nikah mut'ah karena tujuan kesenangan, sedang nikah dâim untuk membentuk keluarga secara abadi.

Di samping itu, ulama Syiah menguatkan argumentasinya dengan berdasar pada fatwa sahabat, yaitu bacaan *الى اجل مسمى* (sampai masa tertentu). Bacaan tersebut populernya bersumber dari Abdullah bin Abbas, 'Ubay dan Ibn Jubayr, berikut ini:

وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فأتوهن اجورهن)²⁹

Artinya: Dan Ibn Abbas, 'Ubay dan Ibn Jubayr membaca (Surah al-Nisâ; ayat 24) "Barangsiapa bermut'ah salah seorang di antara mereka samapai kepada waktu tertentu, maka berikanlah mahar kepadanya sebagai suatu imbalan.

²⁷ Bandingkan dengan pendapat Hasan dan Mujahid dalam Al-Qurtubiy, *op. cit.*, h. 129

²⁸ Lihat argumentasi Al-Tabatabai yang menyatakan bahwa lafal *istamta'a* mengandung makna nikah mut'ah yang tidak mungkin ada pada nikah permanen, sebab tujuan nikah tersebut (nikah dâim) bertentangan dengannya; lihat Muhammad Husayn Al-Tabatabai, *op. cit.*, h. 279-289.

²⁹ Al-Qurtubiy, *op. cit.*, h. 130

Menurut paham Syiah, bacaan itu merupakan penafsiran yang menyatakan disyariatkannya nikah mut'ah. Bacaan itu dikategorikan ayat batiniah yang termaktub dalam mushaf mereka, kendatipun tidak disebutkan sebagai Alquran. Bacaan itu dianggap argumentatif yang berstatus *ijma' min al-ummah* karen atak seorangpun yang menyalahkannya.³⁰

Menurut metodologi, *ijma'* yang merupakan kesepakatan ulama (*ijma' sarikh*) kehujjahannya setingkat di bawah dari dalil-dalil nas, yaitu Alquran dan Hadis. Sebab itu, jika bacaan tersebut terbukti benar-benar tergolong *ijma'* maka tiada pilihan lain kecuali menerima ayat itu sebagai ayat yang mensyariatkan mut'ah.

Ijma' yang dikategorikan *sarikh* harus memenuhi beberapa syarat, dan yang paling penting diantaranya adalah *ijma'* itu dinyatakan oleh para mujtahid berdasarkan hasil pemikiran mereka.

Apabila kriteria tersebut diperhadapkan kepada bacaan *الى اجل مسمى*, agaknya sulit ditetapkan sebagai *ijma' sarikh* karena para mujtahid berselisih paham dengan yang lain, sebahagian mengemukakan bahwa ayat itu (4:24) membicarakan nikah dâim, khususnya lafal *istamta'tum* yang menegaskan kesempurnaan hukum mahar bagi wanita, sedang yang lain membicarakan nikah mut'ah. Adanya perbedaan paham itu menun-juk ketiadaan persamaan persepsi atas kebenaran maksud bacaan tersebut.

³⁰ Atat Muhammad Salim, *Nikâh al-Mut'ah 'Abr al-Târikh* (t.t.: Maṭba'ah al-Madaniy, t.th.), h. 26.

Di samping itu, kesepakatan ulama harus dinyatakan secara tegas berdasarkan hasil ijtihad mereka, sementara bacaan tersebut asing di kalangan sahabat. Menurut akal, sesuatu yang asing tidak logis jika disepakati karena tidak dikenal oleh orang banyak. Seperti riwayat berikut ini:

عن أبي نضرة قال: "قرأت هذه الآية على ابن عباس (فما استمتعتم به منهن) قال: ابن عباس: "إلى أجل مسمى" قال: "قلت ما أقرؤها كذلك" قال: "والله لأنزلها الله ثلاث مرات".³¹

Artinya: Dari Abu Nadrah, ia berka *famas-tamta'tum bi hi minhunna fa âtûhunna ujûrahunna farîdah*" di hadapan Ibn Abbas, kemudian ia berkata *famastamta'tum bi hî mihunna ilâ ajal musammâ*, maka canya seperti itu. Ibn Abba kannya dengan maksud seperti itu.

Kalaupun bacaan itu dikatakan *ijma'*, maksimalnya masuk pada *ijma' sukut* karena alasan ketiadaan orang yang menyalahkannya. Persetujuan seperti itu, tidak dikemukakan secara tegas, dalam arti para ulama *sukût* (diam) terhadap kebenaran maksudnya, kecuali segelintir orang saja yang membenarkannya. *Ijma'* semacam ini, umumnya ulama tidak memasukkannya sebagai hujjah yang *qat'iy*, bahkan *ijma'* sekalipun.

Dalam hal ini Al-Tabatabai (Syi'iy) menyadari bahwa bacaan tersebut memang tidak sepatutnya dijadikan hujjah untuk menetapkan

³¹ Semua periwayar yang terlibat (Ibn al-Muṣannā, Muhammad bin Ja'far, Syu'bah, Abi Salamah, dan Abi Nadrah) memiliki peringkat *siqah*. Karena itu, riwayat ini dapat diterima sebagai hujjah; lihat kitab Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Taqrib al-Tahzib*, juz II (Pakistan: Dār al-Nasyr al-Kutub al-Islāmiyah, 1393 H), h. 204, juz I, h. 351, juz ع, h. 409 dan juz ع, h. 347.; lihat Ibn Jarīr, *loc. cit.*, al-Ahdal, *op. cit.*, h. 241.

ayat 24 surah al-Nisâ sebagai ayat mut'ah. Tetapi, ia lebih cenderung memahami dari pengertian lafal ayat itu (*istamta'tum*)sendiri.³²

Dari pernyataan itu, tampaknya sebahagian penganut Syiah ragu dan menolak, sehingga tidak sepakat menerima bacaan *ilâ ajal musammâ* sebagai hujjah yang *qat'iy*. Dan bahkan, jika dikaitkan metodologi mereka, yang mana fatwa sahabat berdasarkan pendapat pribadi tidak dianggap sebagai hujjah. Karena itu, bacaan tersebut tidaklah lebih dari argumentasi biasa yang berstatus *zanniy*. Akan tetapi, karena ia menyatakan nikah mut'ah, maka dikokohkanlah pendapat tersebut dan dijadikan dalil argumentasi yang menyatakannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas disimpulkan bahwa bacaan *ilâ ajal musammâ* merupakan bacaan yang *syazh* (asing) yang dinya-takan berdasarkan pendapat pribadi, bukan *ijma' al-sahâbah*. Dalam hal ini, bacaan tersebut diperselisihkan karenanya kurang kuat untuk dijadikan hujjah dalam menetapkan kebolehan mut'ah.

Karena itu, lafal *istamta'tum* tampaknya lebih sesuai jika memaksudkan nikah dâim menurut munâsabahnya, sebab pernyataan yang lahir atas dasar samar (*zanniy*) dikalahkan oleh pendapat yang diyakini dan disepakati kebenaran maksudnya. Sehingga bacaan *ilâ ajal musammâ*, tak dapat dijadikan hujjah yang *qat'iy* yang menegaskan syariat kebolehan nikah mut'ah.

2. Nikah Mut'ah dengan Ayat-ayat lain.

³²Lihat Al-Tabatabai, *op. cit.*, h. 307.

Allah swt. menurunkan Alquran yang secara keseluruhan berfungsi sebagai *hudan* (petunjuk) bagi semua insan yang berimaninya. Isi kandungannya mustahil bertentangan antara satu dengan yang lain, karena secara utuh bersumber dari Yang Satu, ialah Allah swt. yang diterima secara *mutawâtir*, tidak ada keraguan atas kebenarannya.

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa nikah mut'ah memiliki tujuan serta syarat-syarat pelaksanaan. Terbukti, dalam nikah mut'ah seseorang melangsungkan perkawinan semata-mata untuk memperoleh legalitas hubungan seks selama priode tertentu yang disepakati bersama, sedang aspek terpenting lainnya dikesampingkan, seperti terpeliharanya diri, ketenangan jiwa, lahirnya keturunan, kasih sayang dan bertambahnya lingkup pergaulan kekeluargaan karena perkawinan. Sedang, nikah ini dengan tujuan-tujuan tersebut amat jauh darinya, sebagaimana uraian berikut ini:

a. Tujuan Perkawinan

Dambaan memiliki pasangan merupakan fitrah manusia yang lahir sejak sebelum usia dewasa. Gejala itu muncul seiring dengan perkembangan pisik, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Desakannya amat sulit dibendung, apalagi jika tidak didasari dengan iman di dada. Olehnya itu, agama mensyariatkan adanya perkawinan untuk kemaslahatan umat manusia sekaligus meniggikan kemurnian akhlak.

Dalam Alquran, Allah swt. berfirman dalam QS. al-Rûm (30):21 dan QS. al-A'raf (7):189, berikut ini :

١- ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³³

٢- هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ...

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya³⁴ Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya...

Dalam ayat-ayat di atas, ada dua frasa yang perlu diperhatikan, yaitu :

ليسكن اليها (agar dia merasa senang kepadanya) dan لتسكنوا اليها (supaya kamu cenderung kepadanya). Kata itu berakar pada kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak dan atau hatinya tenteram kepadanya.³⁵ Dari pengertian itu dipahami bahwa ikatan perkawinan membuat manusia tenang setelah tadinya merasa gelisah karena dorongan nafsu syahwat yang sulit terbendung. Menurut Quraish Shihab, ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.³⁶ Sedang Fakhr al-Din memaksudkan kedua frasa itu “Agar hatimu dan hatinya merasa tenteram kepadanya”. Hal itu didasarkan pada kaedah yang mengatakan bahwa lafal *sakana* yang diiringi huruf *jar*

³³Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 644.

³⁴*Ibid.*, h. 253.

³⁵Butrus al-Bustani, *al-Qâmus al-Muhîl*, juz I (Bairut: Maktabah Lubnan, t.th.), h. 946.

³⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1996), h. 192.

ilâ, maka sesuatu yang dikomentari mengacu pada hati.³⁷ Jadi, ikatan per-kawinan merupakan wahana tersimpulnya ikatan batin suami isteri, yang mana keduanya merasa tenang, dan tenteram dibuatnya, bukan sekedar untuk memperoleh legalitas seksual seperti yang tercermin dalam nikah mut'ah.

Dari uraian-uraian di atas tergambarlah bahwa inti/tujuan perkawinan yang paling dalam adalah ikatan lahir batin yang dibina atas rasa *mawaddah* dan *rahmah* secara abadi. Perkawinan semacam itulah yang dilegalisir dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".³⁸

Makna perkawinan yang tersirat di atas disepakati oleh ulama mufassir, baik dari Syiah maupun Sunni. Oleh karena itu, makna yang disepakati keabsahannya, kehujjahannya lebih valid ketimbang memilih makna yang dipertentangkan.

b. Pelaksanaan Nikah Mut'ah

Dalam pelaksanaan nikah mut'ah terdapat syarat dan rukun yang juga bertentangan dengan yang ada pada nikah dâim.

³⁷Muhammad al-Râziy Fakhr al-Dîn, *Tafsir al-Fakr al-Râziy*, jilid XIII (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 111.

³⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Undang-Undang Perkawinan* (Surabaya: Gitamedia Press, t.th.), h. 1.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa inti/tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketenteraman jiwa, pemeliharaan diri dan sebagainya. Tampaknya tujuan-tujuan tersebut tak dapat diperoleh dalam nikah mut'ah, yang mana pemuasan seksual merupakan motivasi utama terlaksananya, sehingga setelah masa kepuasan berlalu sesuai dengan perjanjian, maka nikah ini pun bubar tanpa pengaruh hukum yang diakibatkan. Kalau demikian, apa bedanya dengan prostitusi-prostitusi yang dialokasikan secara legal, mungkinkah pembayaran itu dinisbahkan pada mahar yang membuat percampuran menjadi halal, dan setelah keduanya bernikmat-nikmat, keduanya pun bercerai tanpa pengaruh yang ditimbulkan.

Di samping itu, dalam nikah mut'ah perceraian mutlak adanya sebab merupakan salah satu syarat sahnya nikah tersebut. Sedang perceraian dalam Islam merupakan hal yang tercelah, bahkan haram oleh menurut sebahagian ulama.³⁹

– أبغض الحلال الى الله الطلاق^{٤٠}

Artinya: Di antara sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.

Hadis di atas, tak seorang pun ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan ulama sesudahnya yang membantah kesahihan dan kadungan

³⁹ Menurut ulama Hanafiah perceraian dalam perkawinan tanpa disertai-alasan yang dibenarkan haram hukumnya dalam agama. Akan tetapi, jika ada alasan yang dibenarkan, maka hukumnya mubah., lihat Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali* (Cet. XI; Jakarta: Hidayakarya Agung, 1985), h. 113.

⁴⁰ Abu Dâud Sulaiman bin al-Asy'asy al-Sajastâniy al-Azadiy, *Sunan Abi Dâud*, juz II (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 255.

maknanya.⁴¹ Demikian pula ulama Syiah, cuma pada nikah mut'ah di anggap sebagai suatu keistimewaan, karena hal itu boleh saja dipilih (cerai) jika dikehendaki dan boleh juga disambung kembali (ikatan perkawinan) asal saling merelakan. Pemahaman seperti itu, agaknya bertentangan dengan hakekat perkawinan sebagaimana yang tersirat pada makna ayat dan hadis-hadis tersebut. Bahwa, dengan perkawinan merupakan usaha untuk meninggikan kesucian moral, sementara kawin dan cerai sana sini amatlah bertentangan dengan hakekat disyariatkannya undang-undang perkawinan.

B. Nikah Mut'ah dan Hadis-hadis

Jika diperhatikan hadis-hadis Nabi tentang nikah mut'ah, maka dijumpai banyak riwayat baik dari kitab Sunni maupun kitab Syiah. Akan tetapi, di pihak Sunni lebih banyak karena di dalamnya diriwayatkan yang membolehkan dan yang melarang.⁴² Sedang kitab hadis Syiah umumnya mereka membatasi periwayatannya pada hadis-hadis yang membolehkannya saja.

⁴¹Boleh dikata, bahwa hadis tentang talak itu adalah hadis *mutawâtir*, disepakati keabsahannya oleh semua ulama mazhab, baik Syiah maupun Sunni. Dan mereka juga sepakati bahwa melakukan talak adalah perbuatan tidak baik. Akan tetapi, khusus pada nikah dâim, sedang nikah mut'ah dianggap tidak mengapa.

⁴²Lihat mu'jam hadis dengan kata dasar *mata'a* dalam A.J. Wensink, *Miftah Kumîz al-Sunnah* (Lahore: Suhayl Akademiy, 1391 H), h. 519 dan juga karyanya, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâz al-Aḥādîs al-Nabawiy*, juz VI (Leiden: Matba'ah Brill, 1967), h. 164-167.

a. Hadis-hadis yang membolehkan nikah mut'ah, antara lain:

١- عن سهيل بن زياد، وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن أبي بجران، عن عاصم بن حميد عن أبي نصير . قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة".^{٤٣}

Artinya: Dari Suhayl bin Ziyād, Ali bin Ibrāhīm, dari bapaknya semua, dari Ibn Abî Najrân, dari Ashim bin Hamid, dari Abî Nushayr, ia berkata: Saya bertanya kepada Abu Ja'far as. tentang mut'ah, ia berkata (mut'ah) diturunkan melalui Alquran "*famas-tamta'tum bi hî...*".

٢- عن قيس قال سمعت عبد الله يقول: كما نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا نساء . فقلنا : الا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا ان نكح المرأة بالثوب الى اجل ...^{٤٤}

Artinya: Dari Qays, ia berkata, "Saya mendengarkan Abdullah berkata: "Kami pergi berperang bersama Rasul saw. tanpa disertai wanita (isteri). Kami bertanya: Bolehkah kami berkebiri? (untuk melampiaskan nafsu seksual)" ternyata, beliau melarangkannya. Kemudian kami diberi kemurahan untuk menikahi wanita dengan mas kawin sehelai pakaian dalam jangka waktu tertentu...

b. Hadis-hadis yang melarang nikah mut'ah, antara lain:

١- روى عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمير الانسية.^{٤٥}

⁴³ Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulayniy, *op. cit.*, h. 448.

⁴⁴ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyayriy al-Naysabūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 1022.

⁴⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārīy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, juz III (t.t.: Dār Ithā al-Kutub al-'Arabīyah, t.th.), h. 246; lihat Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Sawrah al-Turmuzī, *Sunan al-Turmuziy (al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ)*, juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 295; lihat Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), 630-631.

Artinya: Ali meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasul saw. melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai kampung pada perang Khaibar.

Jika diperhatikan hadis-hadis yang ada, maka ada tiga pendapat yang mungkin timbul. Pendapat pertama, yakni menghalalkan nikah mut'ah secara mutlak seperti yang diperpegangi oleh Syiah; Kedua, pendapat yang membolehkan nikah mut'ah dalam kondisi tertentu, misalnya kondisi darurat; dan ketiga, pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak sebagaimana yang dipahami oleh Sunni.

Pada dasarnya hadis-hadis yang telah dikemukakan dipandang sebagai hadis yang memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah. Misalnya, di pihak Syiah riwayatnya dituturkan oleh seorang imam yang menurut kaedah kesahihan mereka mutlak kebenarannya, karena itu, nikah mut'ah ditetapkan sebagai perbuatan yang dihalalkan. Sedang di pihak Sunni, mereka bersepakat menyatakan mut'ah itu adalah haram, di mana mereka menempatkan hadis-hadis tersebut pada judul (hadis) "keharaman nikah mut'ah".⁴⁶ Di samping itu, mereka mengakui bahwa pada awal perkembangan Islam nikah mut'ah direalisir, namun masa-masa selanjutnya diharamkan.

Untuk itu ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, sebagai berikut: 1) Kandungan hadis; dan 2) Hadis-hadis yang bertentangan.

⁴⁶Lihat misalnya dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan Abi Dāud*, *Sunan al-Tirmūziy* dan kitab-kitab lainnya, kesemuanya itu menempatkan nikah mut'ah pada judul yang diharamkan.

a) Kandungan hadis.

Terlepas dari pemahaman Syiah dan Sunni tentang hukum nikah mut'ah, maka ada dua lafal yang sepatutnya diperhatikan, yaitu:

(a) lafal *الا نسختني* (bolehkah kami berkebiri?). Menurut penulis, lafal itu merupakan *qarīnah* (indikasi) yang menunjuk diharamkannya nikah mut'ah. Sebab, sekiranya hal itu tidak termasuk perbuatan tercela (haram), maka perkataan tersebut tidak akan keluar dari mulut sahabat, dan mereka tak segan-segan melakukannya di hadapan Nabi tanpa pemberitahuan lebih awal. Akan tetapi, karena umat Islam terdesak oleh kebutuhan biologis, maka pengebirian hampir saja dilakukan. Untung Nabi saw. melarang mereka atas perbuatan itu dan sebagai gantinya dibolehkan nikah mut'ah.

Perlu juga dipikir bahwa tindakan pengebirian termasuk salah satu tindakan yang menyakitkan, tetapi mengapa sahabat rela menempuh tindakan semacam itu padahal ada nikah mut'ah yang menyenangkan. Sekiranya mut'ah benar-benar dihalalkan, maka tidak logis dipilih kesakitan (penegebirian) lantas ditinggalkan kenikamatan (nikah mut'ah). Olehnya itu ditegaskan oleh Al-Qurtubiy bahwa Nabi saw. membolehkan nikah mut'ah kala itu karena dikhawatirkan umat Islam tergiring ke arah perzinaan (yang lemah iman) dan pengebirian (yang kokoh iman), sedang jalan terbaik di antara yang jelek adalah nikah mut'ah, lagi pula nikah dâim belum disyaratkan secara sempurna.⁴⁷

⁴⁷ Bandingkan keterangan Al-Qurtubiy, *op. cit.*, h. 130.

(b) Lafal رخص yang berakar dari kata *rakhusa* dan kata masdarnya, *rukhsah*. Menurut bahasa (*rukhsah*) ialah *al-takhfif* (keringanan) atau *al-tashil* (kemudahan).⁴⁸ Sedang menurut istilah ialah hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah swt. atas orang-orang mukalaf yang dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan.⁴⁹

Berdasarkan definisi tersebut dipahami bahwa dalam kondisi terpaksa, suatu beban, dapat dikerjakan tidak menurut seharusnya, apakah beban wajib dilaksanakan, misalnya salat atau beban wajib dihindari (haram) seperti memakan bangkai dan sebagainya. Karena itu, seseorang yang dalam keadaan terancam hidupnya (kelaparan) karena ketiadaan makanan halal, maka dibolehkan padanya sekedar mencicipi makanan haram, seperti bangkai sebatas mempertahankan hidup, dan tidak lebih dari itu, sehingga tidak dibenarkan padanya menikmati makanan haram apa saja dengan sepuas-puasnya. Dalam suatu kaedah dikatakan: *الضرورات تبيح المحظورات* (Keadaan darurat itu membolehkan larangan-larangan).⁵⁰

Pengertian *rukhsah* di atas, maka mungkinkah nikah mut'ah dapat teraplikasikan dalam bentuk demikian atau tidak. Menurut Ibn Abbas, *rukhsah* seperti itu identik dengan *rukhsah* yang ada pada nikah mut'ah, yakni adanya kesulitan untuk menyalurkan nafsu seksual pada

⁴⁸ Louis Ma'luf, *op. cit.*, h. 254.

⁴⁹ Abu Zahrah, *loc. cit.*

⁵⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣul al-Fiqh* (Cet. XII; t.t.: Dār al-Qalam, 1978), h.208.

saat-saat perang berlangsung.⁵¹ Seirama *qiyās* (analogi) tersebut, Ibn ‘Umrah berkata:

"انها كانت رخصة في اول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم احكم الله تعالى الدين ونهى عنها."⁵²

Artinya: Sesungguhnya nikah mut‘ah itu adalah rukhsah di awal Islam bagi orang-orang yang terpaksa melakukannya, sebagaimana (dibolehkannya memakan) bangkai, darah, dan daging babi, ... kemudia Allah swt. menetapkan hukum agama dan melarangnya (nikah mut‘ah).

Berkenaan *rukhsah* tersebut Abd. Rahman al-Ahdal menyimpulkan bahwa *rukhsah* mut‘ah disebabkan karena tiga faktor, yaitu:

- a) Umat Islam sedang berperang di jalan Allah;
- b) Wanita saat itu masih terbatas jumlahnya, sehingga terdapat kesulitan untuk melaksanakan nikah; dan
- c) Kebutuhan untuk kawin sudah sangat mendesak.⁵³

Tanpa mengurangi nilai riwayat-riwayat di atas, penulis akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

(1) Nikah mut‘ah dan bangkai, daging babi dan semacamnya, agaknya kurang relevan jika dipersamakan dalam hal *rukhsah* darurat karena :

- (a) Kebutuhan makan dan minum adalah kebutuhan *daruriy* bagi setiap insan. Karena itu, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan bagi orang yang kelaparan kecuali dengan makan dan minum, sehingga dalam kondisi darurat memakan bangkai dibolehkan dalam agama (*rukhsah daruriy*). Bahkan menurut

⁵¹ Al-Hâkim dalam Muhammad Husayn al-Tabatabai, *op. cit* (*Tafsîr al-Mizân*), h. 298.

⁵² Al-Nawawiy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawiy*, juz IX (Cet. III; Bairut: Dâr al-Fikr, 1978), h. 180.

⁵³ Muhammad ‘Abd al-Rahman Syamîlah al-Ahdal, *op. cit.*, h. 251.

Abu Zahrah, memakan bangkai atau macam lain dalam kondisi kritis hukumnya wajib.⁵⁴ Sebab tanpa memakannya, sudah tentu jiwa akan terancam, sedang memelihara jiwa dalam agama termasuk tingkatan *darûriy*, yakni tingkatan paling tinggi setelah mempertahankan agama.⁵⁵

- (b) Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan *darûriy*,⁵⁶ cuma sedikit lebih di bawah pentingnya dari makanan dan minuman, sehingga tidak akan menimpakan bahaya fatal, seperti kematian sebagaimana bahaya yang bakal menimpa orang-orang yang kelaparan. Dan yang paling tinggi bahayanya akan membuat orang hilang keseimbangan. Akan tetapi, hal itu sangat langka dan dapat di atasi dengan cara berpuasa, sebagaimana sabda Nabi saw.:

فقال لنا (عبد الله) رسول الله صلى الله عليه وسلم . يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .⁵⁷

Artinya: Rasul saw. pernah berkata kepada kami (Abdullah ibn Mas'ud): Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu akan belanja maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya (menikah itu) menjaga pandangan mata dan membentengi kehormatan. Dan barang-siapa yang belum sanggup (belanja) maka hendaklah ia berpuasa karena (puasa itu) dapat membentengi nafsu.

⁵⁴Lihat Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 51.

⁵⁵Abu Ishâq Ibrâhîm Musâ al-Lakhmiy al-Garnâtiy dan yang masyhur al-Syâtibiy, *al-Muwâfaqât fî Uṣul al-Aḥkâm*, jilid I (Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 15.

⁵⁶Kebutuhan seksual betul termasuk kebutuhan *daruriy* tetapi tidak setingkat hajat manusia pada makanan dan minuman. Seksual lebih rendah, karena tidak akan melahirkan bahaya separah dengan bahaya ketiadaan makan dan minum.

⁵⁷Al-Bukhâriy, *op. cit.*, h. 238; Muslim, *op. cit.*, h. 1018-1019.

Dengan adanya perintah puasa merupakan isyarat bahwa kebutuhan seksual dapat teratasi tanpa melakukan nikah mut'ah. Sedangkan memakan bangkai tidak ada pilihan lain kecuali dengan memakannya. Adapun istilah pengebirian, pada hakekatnya merupakan budaya yang telah lama dijalankan oleh bangsa Arab, bukan karena ketidakmampuan kaum Quraisy mengatasi kebutuhan seksual tersebut, meskipun dalam keadaan sulit. Dan tindakan seperti itu dianggap jalan terbaik untuk mengatasi kebutuhan mereka. Jadi, pada intinya hadis itu ada dua persolan yang dikemukakan sekaligus, yakni nikah mut'ah dan pengebirian yang dua-duanya tidak disenangi dalam Islam, meskipun pada tahap awal Nabi lebih dahulu mengharamkan pengebirian kemudian menyusul nikah mut'ah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nikah mut'ah dengan bangkai dan semacamnya bisa saja dianalogikan ke arah *darûrah* pada awal Islam karena belum disempurnakan syariat nikah permanen. Sebab, umumnya sahabat ketika itu telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak direstui oleh agama, walaupun mut'ah masih tetap dijalankan secara *rukhsah*.

Oleh karena itu, pada hakekatnya bangkai dan mut'ah untuk kondisi sekarang ini kurang sesuai untuk dianalogikan ke arah sana. Nikah mut'ah sebagai suatu kebutuhan berfungsi untuk sekedar memberikan kesenangan seksual, sedang memakan bangkai dan lain-lainnya sebagai penyelamat jiwa orang yang kelaparan. Jadi, kebutuhan atas kedua

persolan itu amat berjauhan, walaupun disadari keduanya dalam kondisi kesempitan.

Pada sambungan riwayat di atas dikatakan bahwa “ke-*rukhsah*-an nikah mut‘ah terbatas pada awal Islam, tetapi, pada masa selanjutnya ditetapkan keharamannya oleh agama”. Jadi, hukum *mut‘ah rukhsah* ketika itu masih saja ditolerir karena belum dinyatakan secara tegas tentang keharamannya.

Jika pernyataan tersebut benar-benar seperti *rukhsah* yang dimaksud dalam kaedah, maka ia tidak mempunyai batasan waktu, misalnya khusus pada masa Nabi saja, oleh karena, darurat dapat dijumpai kapan pun dan di mana pun saja. Dan bukankah kesanggupan sabahat melawan hawa nafsu jauh lebih hebat ketimbang manusia belakangan sekarang, sementara problema seksual masa kini jauh lebih berbahaya, setidaknya sama dengan masa lalu (masa Nabi saw.), tetapi kenapa persoalan itu dikhususkan pada masa itu saja. Dari dasar itu, penulis berasumsi bahwa kurang bijaksana jika hukum darurat hanya diperuntukkan pada masa Nabi saw. dan tidak untuk umat selanjutnya. Padahal telah jelas dalam Islam tidak mengenal istilah hukum diskriminasi, seperti khusus dikalangan sahabat, tabiin atau lain-lainnya. Yang jelas, hukum Allah dan Rasulnya berlaku kepada umat Islam secara universal.

Karena itu, *rukhsah* pada awal Islam merupakan langkah awal ditegakkannya hukum atas keharaman nikah mut‘ah sebagaimana indikasi yang dipahami dalam QS. al-Mu‘minun (23): 5-7. Dan untuk masa

selanjutnya barulah ditetapkan keharamannya sebagaimana sambungan riwayat “Dan Allah swt. menetapkan hukum agama dan melarangnya (nikah mut‘ah)”. Maka dari itu, istilah *rukhsah* tampaknya terbatas pada masa transisi itu saja, dalam arti belum ada dalil-dalil nas yang secara pasti menunjuk keharamannya. Tetapi, untuk dianalogikan kepada makanan dengan merujuk pada kaedah di atas kurang sesuai, karena itu istilah *rukhsah* nikah mut‘ah terbatas pada waktu itu saja. Besar kemungkinan pernyataan *rukhsah* nikah ini karena belum ditetapkan undang-undang nikah dâim secara sempurna. Dan setelah masa itu berlalu, maka tampaklah secara jelas banyak bertentangan dengannya, baik dari aspek tujuan syarat/rukun maupun dari aspek hukum setelah perceraian yang kesemuanya berdasarkan Alquran dan Sunnah *mutawâtir*.⁵⁸ Jadi kaedah yang dikemukakan di atas adalah benar kepada orang yang kelaparan untuk memakan bangkai dan lain-lainnya.

Seperti dinyatakan *Tafsîr al-Munîr* bahwa: Jumhur berkata: Nikah mut‘ah yang terjadi pada awal Islam adalah *rukhsah* (keringanan) kepada sahabat yang berperang. Nabi saw. mengizinkannya sekali atau dua kali dalam jihad, seperti Perang Awtas dan Tahun Pembebasan Kota

⁵⁸Dikemukakan oleh Zarkâniy bahawa suatu bukti diharamkannya mut‘ah karena tidak ada kesepakatan hukuman atas pelakunya, apakah dirajam atau tidak. Perbedaan itu dikarenakan mut‘ah bukan termasuk suatu kejahatan yang dihukum seperti yang digambarkan Alquran, melainkan harus ada hukuman yang lebih berat pada pelakunya; lihat al-Zarkâniy, *Syarh Muwatta‘ Imâm Mâlik*, jilid III (Kairo: Dar al-Fikr, 1959), h. 152-153.

Mekah, kemudian ditetapkan keharamannya,⁵⁹ sebagaimana riwa-yat berikut ini:

— عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلعم عن المتعة،
فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسحت.⁶⁰

Artinya: Ali bin Abi Talib berkata: Rasul saw. telah melarang nikah mut'ah
ketika turun ayat nikah dâim, talak, iddah dan kewarisan antara suami isteri maka mutah ia di-*nasakh* hukum kebolehannya.

Dalam riwayat lain dikemukakan:

— حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . حدثنا أبي . حدثنا عبد العزيز بن عمر . حدثني الربيع بن سبرة الجهني ؛ ان اباہ حدثه ؛ انه كان مع رسول الله صلعم فقال "ياايها الناس ! انى قد كت اذنت لكم فى الاستماع من النساء . وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما آتيموهن شيئا .⁶¹

Artinya: Diceritakan Muhammad bin Abdullah bin Numayr, cerita dari bapaknya, dari Abdul 'Aziz bin 'Umar, dari Rabi' bin Sabrah al-Juhanniy bahwa bapaknya mengemukakan suatu ketika mereka bersama Rasul saw. Ia (Nabi saw) bersabda wahai sekalian manusia! Aku pernah membolehkan kalian bermut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal seperti sampai hari kiamat. Barangsiapa yang masih mempunyai isteri lewat nikah itu, maka segeralah dia selesaikan. Dan janganlah mengambil sesuatu apapun yang telah kamu berikan kepada mereka.

Kedua hadis di atas, secara gamblang dipahami bahwa nikah mut'ah yang awalnya direalisir dalam Islam, diharamkan untuk selamanya. Pemberitahuan Nabi Muhammad saw. tentang keharaman mut'ah diterima secara mutawatir. Dalam hal ini, hukum nikah mut'ah terjadi

⁵⁹Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, juz V (Bairut: Dâr al- al-Fikr al-Ma'âsir, 1991), h. 12.

⁶⁰Lihat riwayat al-Dâr Qutniy dalam al-Ahdal, *loc. cit.*

⁶¹Muslim., *op. cit.*, h. 1025.

nâsikh dan *mansukh*. Kalau tadinya di awal Islam dibolehkan berdasarkan dispensasi Nabi saw., maka setelah lengkap undang-undang nikah dâim menjadi terlarang.⁶² Ibn Hajar al-‘Asqalâniy kembali menegaskan bahwa keharaman hukumnya disepakati oleh para sahabat dan para tabiin,⁶³ kecuali segelintir orang, seperti dari kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas membolehkannya dalam kondisi darurat. Namun, dalam riwayat lain pada akhir hayatnya ia menarik kembali ijtihadnya dan menyatakan haram.⁶⁴ Menurut kaedah ijtihad secara individu (meng-halalkan mut‘ah) dikalahkan oleh ijtihad *jam‘iy min al-sahâbah*, yakni mengharamkan mut‘ah. Karena itu pendapat yang lebih argumentatif adalah diharamkan nikah mut‘ah. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Muhammad Muslehuddin bahwa sekelompok sahabat, tabiin dan fuqaha Mekah yang awalnya menganggap mut‘ah dibolehkan setelah mening-galnya Nabi saw., namun pada akhirnya mereka mengakui dan mena-rik kembali pernyataanya secara jelas.⁶⁵

⁶²*Nâsikh* dan *mansukh* adalah metode istinbat yang dibenarkan oleh semua aliran, khususnya *nasakh* antara Sunnah dengan Sunnah. Alquran dengan Sunnah, cuma yang dipertentangkan oleh sebahagian ulama adalah Sunnah menasakh Alquran karena Alquran lebih kuat dibanding Sunnah, walaupun oleh sebahagian ulama ada pula yang membolehkannya. Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada persoalan karena Alquran (ayat nikah, waris dan iddah) yang menasakh Sunnah tentang mut‘ah atau Sunnah dengan Sunnah; lihat Abu Ishâq Ibrâhim bin ‘Ali bin Yûsuf al-Syayrâziy, *al-Luma‘ fî Uṣul al-Fiqh* (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), h. 59.

⁶³Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, *op. cit.*, h. 79.

⁶⁴Lihat Syams al-Din Muhammad bin Abi Bakr bin Qayyim al-Jawziy, *Zâid al-Ma‘ad fi Hady Khayr al-‘Ibâd*, jilid IV (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 7.

⁶⁵Salah seorang Qadi Mekah yang paling menonjol ketika itu ialah Ibn Juraij yang menyatakan validnya mut‘ah, kemudian dibatalkannya; lihat Muhammad Muslehuddin, *Mut‘a (Temporary Marriage)*, h. 50.

Jika diperhatikan metode hukum *nâsikh* dan *mansukh* pada prinsipnya tidaklah lepas dari kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dalam hal ini, mut'ah di-*mansukh* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sekalipun diakui, bahwa dengan dihalalkannya berarti memberikan kemudahan seksual kepada manusia, sehingga tidak merasa sempit. Akan tetapi, dibalik dari itu akan menimbulkan akibat yang lebih fatal, seperti mudanya terjadi perzinaan sebab dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan orang tua (wali) dan tanpa penyaksian saksi. Di mana, perkawinan itu mensahkan seorang wanita mengawinkan dirinya dengan imbalan tak tertentu tergantung dari kesepakatan berdua. Dengan demikian, mut'ah membuka peluang kebebasan melakukan perkawinan sana-sini tanpa perhitungan moral. Dalam hal ini, bakalan yang banyak mengalami pengorbanan adalah pihak wanita dan anak-anak. Wanita tak obahnya barang dagangan yang berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Demikian pula dunia ini bakalan ramai dengan bayi-bayi yang tak berdaya, berayah dan beribu.⁶⁶ Dan yang lebih parah lagi mengenai kelanjutan hidup mereka, siapa yang memberi perlindungan dan pendidikan, apa mungkin ayah masih peduli pada nasib anak mereka, sementara dia kawin lagi di tempat lain. Meskipun ada kemungkinan bagi seorang ayah bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, namun kesempatan untuk itu amat sedikit. Sebab, sedangkan anak yang jelas-jelas berada di bawah pengawasan kedua orang tua

⁶⁶Sayyid Sâbiq, *I'iqh al-Sunnah*, jilid II (Cet. VII; Bairut: Dâr al-Kitab al-'Arabiy, 1985),

mereka, namun kenyataannya masih banyak terbengkalai pendidikan dan pengajarannya, apalagi bagi seorang ayah yang tak dikenal dan yang jauh dari mereka sudah tentu tipis harapan untuk membimbing dan mendidiknya. Jikalau demikian, keberadaan mut'ah besar kemungkinan akan melahirkan generasi-generasi yang tidak berakhlak, berpendidikan dan bahkan beragama. Sementara aspek keuntungan yang diperoleh karenanya tidaklah lebih dari sekedar memberikan kenikmatan sejenak. Dan bahkan yang paling ditakutkan, manakala sistem perkawinan ini dijadikan tameng untuk mengobral nafsu seksul yang cenderung tidak bertanggungjawab dan jauh dari perhitungan nilai-nilai akhlak sebagaimana yang dicontohkan sistem perkawinan dalam Alquran. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan ini kaedah mengatakan:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع.⁶⁷

Artinya: Menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mut'ah di awal Islam dibolehkan berdasarkan dispensasi Nabi, namun karena dipandang akan menimbulkan mudarat yang lebih banyak maka pada akhirnya dibatalkan oleh hukum yang datang kemudian, baik berdasarkan hadis-hadis Nabi maupun ayat-ayat tentang nikah, iddah, waris dan talak, demikian pula sekian banyak ijtihad ulama.

2) Alasan-alasan di-*rukhsah*-kannya nikah mut'ah.

Pada dasarnya ulama sependapat bahwa aspek terpenting yang mempengaruhi dibolehkannya mut'ah ada tiga faktor, yaitu: a) Karena

⁶⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, h. 208.

perang *fi sabilillah*; b) Karena kurangnya wanita; dan c) Keterdesakan untuk melakukan nikah.⁶⁸ Jika diperhatikan faktor-faktor tersebut maka yang esensial dibolehkannya mut'ah adalah karena adanya kebutuhan kawin yang sudah sangat mendesak.

Pada masa Nabi saw., para sahabat umumnya disibukkan oleh perang-perangan, yang dengannya menjadi kendala untuk melakukan nikah dâim.

Perlu diketahui bahwa para sahabat di tahun-tahun pertama di Madinah, mereka berkonsentrasi memperjuangkan agama Islam, sehingga hampir seluruh waktunya dikorbankan untuk perang. Agaknya kondisi seperti itu tidak mustahil akan berulang kembali di masa akan datang, bahkan bisa saja lahir dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain.

Jika diperhatikan aktivitas-aktivitas sekarang ini, tampaknya belum ditemukan yang benar-benar dapat menghalangi terlaksananya perkawinan sebagaimana kegiatan pada masa Nabi. Bahkan justru aktivitas itulah yang membuat orang cenderung lupa kawin. Seperti terlihat di kota-kota besar, bagi mereka yang memiliki kesibukan rata-rata kawin di usia tiga puluhan ke atas, termasuk dalam hal ini para mahasiswa yang menginginkan perkawinan setelah sarjana dan telah memperoleh pekerjaan yang tetap lagi memuaskan. Demikian pula anak sekolah sekarang, perkawinan dianggap suatu kelucuan jika dilaksanakan pada usia tahap belajar.

⁶⁸Lihat kesimpulan *rukhsah* yang dikemukakan oleh Al-Ahdal pada, *loc. cit.*

Barangkali tindakan itu merupakan suatu keanehan di masa sekarang, anak-anak cenderung menjauhi perkawinan, sementara kebebasan seksual tetap mewarnai kehidupan mereka. Benarkah mereka takut karena ketakutan cita-cita tidak terkabulkan, sebagaimana alasan dibolehkannya (*mut'ah*) menurut Syiah.⁶⁹ Saya kira perlu dicermati lebih lanjut karena tidak semua orang yang telah menikmati perkawinan gagal pendidikannya, begitu pula sebaliknya tidak semua orang yang bujangan berhasil. Dalam hal ini, tergantung kepada siapa yang melakukannya dan bagaimana cara mengalokasikan waktu yang ada. Akan tetapi, suatu hal yang tidak dimengerti jika ada keinginan menikmati kenikmatan seksual sementara tanggung jawab dihindari. Tindakan semacam itu merupakan sifat tercela dalam agama, lazimnya disebut sifat *al-jubn* (pengecut).

Oleh karena itu, alasan aktivitas untuk kondisi sekarang ini agaknya sulit diterima sebagai suatu penghalang kelangsungan perkawinan dan perwujudan pendidikan.

Mekipun demikian, dalam pendidikan tertentu kadang ditemukan peraturan yang tidak memperkenankan kawin selama dalam proses pendidikan. Menurut penulis, aturan itu pun juga tidak dapat dijadikan alasan sebab dimaksudkan: (1) Untuk mencapai kualitas yang maksimal, seperti pendidikan dalam militer dan sebagainya, dan (2) Aturan tersebut yang dimaksudkan adalah untuk menghindari gangguan dari luar, padahal *mut'ah* dan nikah *dâim* sama saja memberi pengaruh, walaupun nikah

⁶⁹ Lihat Ja'far Muṣṭafa al-Amili, *al-Zawâj al-Mu'aggaṭ fī al-Islām*, diterjemahkan oleh Abu Muhammad Jawād, *Nikah Mut'ah Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992), h. 11.

daim bagi seorang suami pembelanannya lebih banyak ketimbang nikah mut'ah. Lagi pula aturan tersebut yang ditekankan adalah perkawinan dalam bentuk apapun namanya. Lagi pula, dengan masuknya seseorang pada pendidikan tersebut berarti sanggup menahan diri dari dorongan seksual, dan sekiranya mereka tak sanggup sudah pasti menghindar dari pendidikan seperti itu.

Dengan demikian, *masyaqqah* (kesempitan) di-*rukhsah*-kannya nikah mut'ah tampaknya tidak menjadikan penghalang bagi seseorang yang hendak melakukan nikah dâim. Sebutlah misalnya, nikah mut'ah dibolehkan dalam kondisi darurat karena faktor di atas, maka di tempat mana dan kondisi apa yang ada di dunia ini yang tidak memberikan kesempatan untuk melakukan nikah dâim. Saya yakin kesemuanya dapat teratasi dengan baik tanpa melakukan nikah mut'ah.

3. Riwayat-riwayat yang bertentangan.

Salah satu alasan Syiah membolehkan mut'ah, yakni adanya riwayat-riwayat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sebahagian mengatakan mut'ah dilarang pada Hari Khaibar, sementara yang lain mut'ah dilarang pada tahun penaklukan Mekah, Awtas, Tabuk dan sebagainya.⁷⁰

Dalam hadis-hadis Sunni, nikah mut'ah dilaksanakan berkali-kali, bahkan samapai lima kali. Sebenarnya, hadis-hadis tersebut tidaklah

⁷⁰Lihat Al-Qusyayriy, *op. cit.*, h. 1023-1028; Abu 'Abd al-Rahman bin Syu'ayb al-Nasâiy, *Sunan al-Nasâiy*, juz VI (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafa al-Bâb al-Halabi wa Awlâduhû, t.th.), h. 102-103; "Mutah, Nikah" dalam Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 312; H.A.R. Gibb dkk., *op. cit.*, h. 418.

persis dengan dzahirnya seperti yang dipahami oleh ulama hadis. Seperti penaklukan Mekah dan perang Awtas terjadi dalam satu tahun karenanya diperlalukan satu peristiwa yang sama. Olehnya itu, Al-Nawawiy menyatakan bahwa mut'ah terjadi hanya dua kali saja, yaitu sebelum peristiwa Khaibar dan diharamkan pada akhir peristiwa itu juga, kemudian dibolehkan pada masa penaklukan Mekah atau hari Awtas.⁷¹

a) Perang Khaibar.⁷²

Hadis-hadis yang menerangkan tentang perang Khaibar hampir diriwayatkan oleh semua kitab hadis, dan umumnya riwayat tersebut memiliki kualitas periwayat *ṣiqah* dan kualitas sanad sahih. Hadis ini pada dasarnya memiliki derajat *mutawâir* karena diriwayatkan oleh banyak *mukharrij* yang agaknya mustahil sepakat berdusta.

Pada prinsipnya kaum Syiah melemahkan hadis ini sebab adanya riwayat-riwayat yang menyatakan di tempat dan waktu yang lain, bukan dari segi periwayat-periwayatnya lemah. Jadi, yang dipertentangkan oleh mereka adalah penentuan waktu dan tempatnya saja. Alasan seperti itu kurang valid untuk menolak atau melemahkan suatu hadis yang

⁷¹Muslim, *op. cit.*, h. 1022.

⁷²Peristiwa Perang Khaibar terjadi pada akhir tahun 6 H; lihat Abd al-Rahman bin Khaldun, *Târîkh Ibn Khaldun; Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fî Târîkh al-'Arab wa al-Bar-bar wa min 'Asirihim min Zawiy al-Sya'ni al-Akhar*, juz II (Cet. I; Bairut: Dâr al-Fikr li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1981), h. 453; sedang hadis yang menyangkut perang Khaibar memiliki tujuh bentuk *takhrij*, yaitu: (1) Al-Sab'ah, sanadnya sahih (2) Al-Tahawiy, sanadnya sahih; (3) 'Abd al-Razâq, sanadnya sahih; (4) Al-Tabariy, periwayatnya semua *ṣiqah*; (5) Al-Tabrâniy, sanadnya daif karena seorang perawinya yang lemah; (6) Ibn Syâhin dan Mansur bin Dînâr, kedua sanadnya lemah; (7) Abu Rahman al-Gifâriy, sanadnya lemah, lihat Al-Ahdal, *op. cit.*, h. 107-118.

berkualitas sahih, dan seharusnya hadis-hadis yang lainlah menjadi bahan kritikan.

Di samping itu, hadis ini perlu mendapat perhatian khusus, yang mana periwayat pertama umumnya dikemukakan oleh Ali bin Abi Talib. Menurut metode hukum Syiah, hadis seperti itu mutlak kebenarannya dan wajib dilaksanakan maksudnya sebab diriwayatkan oleh *al-Imâm al-A'zam* (Ali bin Abi Talib) yang oleh mereka tiada ucapan terpercaya menandingi ucapannya. Oleh karena itu, kesimpulan yang menegaskan kehalalan mut'ah sangat bertentangan dengan metode tersebut, yang mana memandang mut'ah sebagai perbuatan yang diharamkan dan yang harus dihindari.

Sedangkan riwayat Jabir (peristiwa Umar bin Huraš) yang mengemukakan dirinya melakukan mut'ah dari masa Nabi saw., Abu Bakar sampai dilarang oleh Umar bin al-Khattab dianggap suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena secara umum para sahabat Nabi telah mengetahui keharamannya. Meskipun demikian, Al-Syawkâniy mengulasnya bahwa hal itu mungkin saja terjadi di antara sahabat karena ketidaksampaian berita kepadanya, oleh sebab itu, setelah dinyatakan Umar secara terbuka barulah mereka insaf, seperti yang terjadi pada diri Jabir tersebut.⁷³

Dari uraian di atas dipahami bahwa Jabir bermut'ah ketika itu dengan dasar karena ketidaktahuannya, bahwasanya perbuatan tersebut

⁷³ Al-Syawkâniy dalam Muslehuddin, *op. cit.*, h. 51..

⁷³ Abu Daûd Sulayman bin al-Asy'aš al-Sajastâniy al-Asadiy, *Sunan Abî Dâwud*, juz II (t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 226-227.

telah diharamkan oleh Nabi sebagaimana yang dipertegas oleh Umar. Akan tetapi, adanya sekelompok sahabat Nabi saw. yang luput dari pengetahuan tersebut dipandang hal yang wajar, akan tetapi, yang tidak pantas adalah ketidaktahuan itu justru dijadikan dasar untuk menghalalkannya. Boleh dikata, pelaksanaan nikah mut'ah seperti dalam kasus tersebut akibat ketidaktahuan/ketidaksampaian (berita) syariat kepada mereka yang menyatakan keharamannya.

b) Haji Wada'.

حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن اسماعيل بن امية، عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال (له) رجل يقال له ربيع بن سبرة: اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صعلم نهى عنها في حجة الوداع.⁷⁴

Artinya: Dari Musaddad bin Musarhad, dari Abd al-Wâriš, dari Ismâ'il bin Umayyah, dari al-Zuhriy, ia berkata: Kami berada sekitar Umar bin Abd al-Azîz lalu menerangkan kepada kami tentang mut'ah, maka berkatalah seorang laki-laki, kemudian Rabi' bin Sabrah me-ngatakan padanya: Saya menyaksikan orang tua kami menceritakan bahwa "Rasul saw. melarang nikah mut'ah pada masa haji Wada'".

Dalam riwayat tersebut terdapat seorang sanad yang bernama "Isma'il". Sanad tersebut berperingkat "*syâzah*". Menurut metode kritik, hadis ini dipandang lemah sebab dipengaruhi oleh sifat itu, sehingga kurang kuat untuk diperpegangi sebagai hujjah. Dalam hal ini, ia tertolak.

Di samping itu, hadis tersebut bertentangan dengan sejarah. Sebagaimana hadis-hadis lain Nabi saw. yang membolehkan nikah mut'ah dalam kondisi darurat, seperti perang. Sementara umat Islam yang melakukan ibadah haji ketika itu menurut Al-Qâdiy 'Iyâd adalah

⁷⁴*Ibid.*, h. 226-227.

para sahabat penduduk Mekah sendiri yang dalam keadaan aman.⁷⁵ Selain dari itu, para sahabat yang berangkat menunaikan ibadah haji mereka bersama-sama dengan Nabi yang disertai isteri-isteri mereka.⁷⁶ Berdasarkan informasi tersebut, maka dipahami bahwa syarat dibolehkannya mut'ah tidak memenuhi. Umat Islam dalam keadaan aman, tidak dalam kondisi darurat, dan umumnya mereka yang melaksanakan ibadah haji Wada' adalah pemukim kota Mekah sendiri, sedang yang lain mereka datang bersama dengan keluarga mereka, sehingga para pelaksana ibadah haji sudah tentu jauh dari kondisi darurat. Oleh karenanya, riwayat Jabir itu dipandang kurang valid untuk menyatakan kebolehan nikah mut'ah karena menyalahi kenyataan sejarah yang mana bertentangan faktor-faktor dibolehkannya (nikah mut'ah) dan otomatis bertentangan pula dengan riwayat-riwayat lainnya. Dengan demikian, riwayat tersebut dilemahkan dan tidak dapat digunakan sebagai hujjah.

Ibn Hajar Al-'Asqalâniy menjawab bahwa disebutkannya haji Wada' dalam hadis tersebut merupakan penyiaran atas diharamkannya mut'ah.⁷⁷ Karena dalam pelaksanaan Haji Wada' adalah masa yang ramai dalam pelaksanaan ibadah haji. Sedang pengetahuan umat Islam tentang keharaman nikah mut'ah masih banyak yang belum mengeta-

⁷⁵ Al-Qâdiy 'Iyâd juga menilai bahwa hadis itu lemah; lihat Akmal dalam al-Ahdal, *op. cit.*, h. 159

⁷⁶ Lihat Ibn Hajar al-'Asqalâniy, *loc. cit.*

⁷⁷ Abdullah Hâsyim, *Talkhîs al-Khabr fî Takhrij Ahâdîs al-Râfi'î al-Kabîr*, jilid II (Cet. II; Mesir: Syirkah al-Tabâ'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, t.th.), h. 156.

huinya. Karena itu, peristiwa haji wada' dirasa masa yang paling tepat untuk menyiarkan tentang keharamannya kembali.

Selain dari itu, hadis yang senada dengannya tidak ditemukan kecuali melalui satu jalur periwayat dari kalangan sahabat, yaitu Al-Juhanniy. Umumnya riwayat yang mirip dengannya, baik yang bersumber dari Al-Juhanniy sendiri maupun dari periwayat lain menyatakan keharaman mut'ah pada peristiwa Fath Makkah. Maka dari itu, dinilai adanya kemungkinan terjadi salah periwayatan dalam hadis ini, karena di samping riwayat itu berdiri sendiri, juga bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih dan lebih masyhur darinya, termasuk pernyataan pada peristiwa Hunain, dan Tabuk. Bahkan riwayat yang disandarkan pada periwayat pertamanya sendiri (Al-Juhanniy).

Sedangkan riwayat yang lebih sahih oleh menurut kritikus hadis, pelarangan mut'ah terjadi pada penaklukan Mekah untuk selamlamanya, yakni pada bulan Ramadan 8 H. (Januari 63).⁷⁸ Sebagaimana riwayat berikut ini:

— عن ابن أبي عتبة، عن عمر بن عبد العزيز. حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال "إلا أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن أعطى شيئاً فلا يأخذه."⁷⁹

Artinya: Dari Ibn Abî 'Ablah, dari Umar bin 'Abd 'Aziz, yang diceritakan oleh Rabi' bin Sabrah al-Juhannî dari bapaknya; ia

⁷⁸Pembebasan Kota Mekah terjadi pada tahun 630 M. Timbulnya pertempuran ini masih terkait dengan perang Mu'tah, di mana dua golongan (muslim dan Kafir) tidak jelas di pihak siapa yang menang, akibatnya, kaum kafir menganggap kaum muslimin dalam kondisi lemah. Hal itulah yang mendorong mereka untuk melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati bersama. Maka pada tahun 630 M terjadi perang berikutnya, disebut Fath Makkah; lihat Ibn Khaldun, *op. cit.*, h. 457.

⁷⁹Muslim, *op. cit.*, h. 1027.

berkata sesungguhnya Rasul saw. melarang nikah mut'ah. Dan ia berkata "Ketahuilah sesungguhnya mut'ah itu adalah haram mulai sekarang sampai hari kiamat. Barangsiapa yang pernah mem-berikan sesuatu, maka janganlah ia menariknya kembali".

– حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا يحيى بن آدم حدثنا ابراهيم بن سعيد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن ليه، عن جده قال: امرنا رسول الله صلعم بالمتعة، عام الفتح، حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.⁸⁰

Artinya: Diceritakan Ishaq bin Ibrahim, dari Yahya bin Adam, dari Ibrahim bin Sa'id, dari Abd al-Malik bin Rabi' bin Sabrah al-Juhanni, dari bapaknya, dari neneknya, ia berkata: Rasul saw. membolehkan melakukan mut'ah pada peristiwa Am al-Fath ketika kami memasuki kota Mekah, kemudian Nabi melarang sebelum kami belum keluar dari kota itu.

Pada tahun tersebut, besar kemungkinan undang-undang nikah dâim telah disyariatkan secara sempurna, maka ditetapkanlah keharaman nikah mut'ah untuk masa selanjutnya sebagai nikah yang bertentangan dengan nikah yang disyariatkan oleh Allah swt. Adapaun riwayat-riwayat tentang adanya sahabat-sahabat Nabi (Ibn Mas'ud, Mu'âwiyah, Abu Sa'id, Ibn Abbas, Salamah, dan sebagainya) yang melakukan mut'ah setelah Nabi meninggal penting penelusuran lebih lanjut karena setelah Umar bin al-Khattab mempermaklumkan keharamannya tak satupun di antara mereka yang protes, padahal beliau amat terbuka dalam persoalan agama, sebab itu, pernyataan tersebut dapat dikategorikan *ijma' al-sahabah*. Terlepas dari itu, termasuk suatu kekeliruan jika dikatakan bahwa Umar yang melarang mut'ah sebagaimana argumentasi Syiah. Tetapi, barangkali yang lebih tepat bahwa Umar hanya kembali

⁸⁰ *Ibid.*, h. 1025.

menegaskan keharaman nikah mut'ah sebagaimana pernyataan terakhir Nabi saw.

Dengan demikian, setelah diwurudkannya hadis-hadis di atas maka batallah hukum awal yang membolehkan nikah mut'ah. Pelarangan itu ditempuh oleh Nabi secara pelan-pelan. Hal itu merupakan jalan yang bijaksana dalam rangka pembinaan umat Islam menuju kesempurnaan akidah dan akhlak.

Di samping itu, jika ditilik dari sisi lain, sebutlah bahwa hadis-hadis yang menerangkan kebolehan dan pelarangan nikah mut'ah adalah sahih, maka prinsip yang perlu diperpegangi adalah prinsip keselamatan dan kehati-hatian. Tentunya dalam hal ini, sikap meninggalkan merupakan sikap terpuji karena diiringi sikap kehati-hatian dan selamat dari hal yang dipertentangkan, sedang mengerjakannya berarti mendekatkan diri kepada hal yang terlarang, dan salah sedikit jika perbuatan itu adalah haram, maka dilakukanlah perbuatan yang haram.

c) 'Umrah al-Qadâ.⁸¹

Disebutkan dalam riwayat bahwa pada masa itu ada di antara sahabat yang melakukan mut'ah dengan izin Nabi saw., seperti riwayat berikut ini:

⁸¹Terjadi pada bulan Zul Kaiddah pada tahun ke-7 H (Pebruari 629 M). Dinamai 'Umrah al-Qadâ karena kaum musyrik Mekah Mengosongkan Mekah ketika Nabi saw. bertawaf di Bait al-Haram, Rus'an, *Iintasan Sejarah Islam di Zaman Rasulullah saw.* (Cet.II; Semarang: Wicaksana, 1981), h. 254; Ibn Khaldun, *op. cit.*, h. 455.

عن الحسن قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرته تزين النساء اهل مكة⁸² فشكى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمتعوا منهن واجعلوا الاجل بينكم وبينهن ثلاثا...⁸³

Artinya: Dari Hasan, ia berkata ketika Rasul saw. tiba di Mekah dalam rangka menunaikan umrah sedang wanita-wanita Mekah berhias diri, maka sahabat mengadu kepada Nabi saw. Ia (Nabi saw.) berkata bermutalah dengan mereka secepat mungkin sekitar tiga hari lamanya.

Menurut Ibn Hajar beliau itu (Al-Hasan al-Basriy) adalah *ṣiqah*, *faqih* dan *masyhur*, akan tetapi, umumnya kritikus menilai *murâsîl*-nya *tadlîs*.⁸⁴ Oleh karena itu, umumnya hadis yang diriwayatkan oleh beliau dinyatakan sahih. Akan tetapi, jika ditilik dari hadis tersebut ternyata merupakan salah satu dari *murâsîl*-nya,⁸⁵ sehingga hadis tersebut dinyatakan hadis lemah yang tak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

Meskipun hadis itu tampaknya aman dari sifat *tadlîs* karena diterima dari Hasyîm dengan cara *al-sama'*. Namun tingkat ketepatannya kecil sekali kemungkinan sebab pada umumnya hadis-hadis lain yang lebih sahih darinya bertentangan dengannya. Dengan dasar itu, maka ia tertolak sebagai hujjah dalam menetapkan waktu *rukhsah* mut'ah.

⁸²Riwayat yang benar menurut Ibn Mansur adalah penduduk Mekah, bukan Madinah, lihat Ibn Manzur, *Sunan Ibn Mamûsûr*, jilid III (t.d.), h. 208.

⁸³*Ibid.* Hadis tersebut di-*Takhrij* oleh: (1) Sa'id bin Mansûr, (2) Al-Hasan dari 'Abdah dan Al-Ṣawriy lihat 'Abdullah Hasyim, *op. cit.*, h. 155.

⁸⁴Lihat Al-Ahdal, *op. cit.*, h. 166.

⁸⁵*Ibid.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas disimpulkan bahwa pada hakekatnya mut'ah tidak terjadi berulang kali sebagaimana menurut riwayat, tetapi peristiwa mut'ah hanya terjadi dua kali saja, yaitu pada peristiwa Khaibar dan diharamkan pada masa itu juga (sebelum perang selesai) dan pada masa pembebasan kota Mekah (Âm al-Fath) dan diharamkan setelah itu untuk selama-lamanya.

BAB V

P E N U T U P

A. *Kesimpulan*

Setelah uraian-uraian di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemunculan firqah dalam Islam berawal meninggalnya Nabi saw. yang tidak meninggalkan pesan kepada siapa kelak yang akan menggantikannya, atau persoalan politik.

Menurut kaum Syiah bahwa yang berhak menggantikan Nabi mesti dari keluarganya sendiri, tiada lain kecuali Ali bin Abi Talib. Ia mendapatkan wasiat dari Nabi yang pada hakekatnya bersumber dari Allah swt. untuk menggantikan beliau sebagai khalifah/imam.

2. Nikah mut'ah adalah nikah yang bertujuan untuk memperoleh legalitas seksual, tidak untuk membentuk keluarga sebagaimana dalam nikah dâim. Prinsip semacam itu, samasekali bertentangan dengan nikah yang disyariatkan agama. Nikah mut'ah merupakan tradisi Arab jahiliyah yang telah lama dikenal di kalangan bangsa Arab, yaitu sekitar abad ke-4 AD.

Ketika Islam datang ada beberapa istilah akad yang menjalar di tengah-tengah masyarakat, antara lain yaitu, *nikah al-nâs al-yawm*, *nikah al-istibda'*, *nikâh al-hadn*, *nikah albadl*, *nikâh mut'ah* dan sebagainya. Akad-akad tersebut, hanya satu diantaranya yang mendapat tanggapan positif, yaitu *nikah al-nâs al-yawm* (perkawinan pinangan) karena syarat-syarat dan teknik pelaksanaannya banyak mendekati nilai-nilai Islam yang tidak hanya sekedar untuk memperoleh kepuasan seksual, tetapi seorang

suami berfungsi sebagaimana layaknya maksud syariat, demikian pula pada wanita. Kemudian cara nikah itu ditetapkan sebagai nikah dâim, nikah resmi atau nikah sah.

Adapun bentuk-bentuk akad yang lain dihapus, karena pada hakekatnya bertentangan dengan kehendak perkawinan yang disyariatkan. Akad seperti itu, yang dipentingkan adalah legalisasi hubungan seksual yang cenderung bagian prostitusi, dan tanpa mengindahkan aspek ibadah, dan aspek pemurnian akhlak al-karimah. Dan tak kalah pentingnya perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memperoleh ketenangan batin yang dipupuk dengan rasa *rahmah* dan *mawaddah* sepanjang masa. Penataan semacam itu menciptakan lingkungan keluarga yang bertanggung jawab, dari segi materil dan moril, sehingga membawa lingkungan masyarakat yang tenteram dan aman. Perkawinan tersebut secara hukum bukan sekedar melegalisasi hubungan seksual, melainkan juga sebagai jalan untuk mencapai rida Allah swt.

Penghapusan nikah mut'ah, pada dasarnya dilakukan secara berangsur-angsur. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- a. Pada akhir pemukiman Nabi saw. di Mekah turun QS. al-Mu'minun ayat 1-5 mengisyaratkan bahwa sesungguhnya mut'ah itu tidak pantas disebut sebagai suatu perkawinan (nikah) karena masing-masing pihak tidak menyangandag jabatan mereka sebagaimana yang dimaksudkan dalam syariat agama. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Demikian pula pada

isteri, ia berhak menentukan pilihannya, hamil atau tidak, cerai atau lanjut dan lain-lainnya.

- b. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah beserta para sahabatnya, di sana mereka senantiasa mendapatkan rintangan dalam menjalankan dakwahnya, mereka dihalang-halangi oleh kaum Quraisy, sehingga peperangan tak dapat dielakkan. Dalam pertempuran tersebut, sebahagian sahabat Nabi saw. dalam kesempitan akibat keterdesakan kebutuhan seksual. Maka dari itu, mereka diberi dispensasi oleh Nabi dalam jangka waktu yang singkat, seperti sehari tiga hari untuk melakukan nikah mut'ah.

Mereka dibolehkan berdasarkan dispensasi Nabi karena kekhawatiran akan terjadi perzinaan bagi kaum muslimin yang lemah iman. Sedang yang kokoh, agar mereka terhindar dari sifat tercela yang hampir saja dilakukan oleh mereka, yaitu pengebirian. Dalam hal ini, pengebirian lebih awal dinyatakan pelarangannya oleh Nabi kemudian menyusul nikah mut'ah.

- c. Pada awal Islam, syariat nikah dâim belum ditetapkan secara sempurna, sehingga nikah mut'ah masih ditolerir untuk sementara waktu, dan ketika syariat itu dianggap sempurna maka (mut'ah) dilarang untuk selamanya, sebagaimana tertuang dalam riwayat Al-Juhannî (إلى يوم القيامة).

3. Peristiwa di-*rukhsah*-kan nikah mut'ah terjadi ketika perang Khaibar pada tahun ke-7 H. dan Penaklukan Mekah pada tahun ke-8, sedang peristiwa Awtas dan Hunain adalah peristiwa yang mengikuti Penaklukan

Mekah dan melingkupi semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ketika itu dinyatakan keharaman mut'ah secara abadi, sedang peristiwa haji Wada' yang terjadi pada tahun ke-10 adalah mustahil karena bukanlah ekspedisi, melainkan naik haji ke tanah suci bersama dengan isteri mereka.

Pelarangan yang berdasar pada riwayat itu secara *qat'iy* dari Nabi, sedang Umar adalah penegas ucapan Nabi dan sebagai bukti ketaatan padanya. Dengan demikian, pernyataan Jabir dan lain-lain yang melakukan mut'ah pada masa Nabi, Abu Bakar dan Umar tidak dapat dijadikan argumen untuk menghalalkan mut'ah. Dan jika pernyataan Umar adalah salah, maka pasti direvisi oleh sahabat lain dan tidak mungkin mereka bersepakat mengharamkan perbuatan yang dihalalkan Allah swt. atau sebaliknya. Karena itu, tindakan tersebut merupakan *ijma' al-sahābah* yang membuktikan mut'ah adalah haram.

B. Implementasi Penelitian

Pada prinsipnya nikah mut'ah bertentangan dengan hakekat perkawinan yang disyariatkan, karena itu, perbuatan tersebut disarankan kepada kaum muslimin agar menjauhinya walaupun oleh mazhab lain ada yang membolehkannya. Sebutlah dasar kebolehannya sebanding dengan dalil yang melarang, maka lebih pantas diikuti adalah yang melarang. Sebab, menjauhi larangan itu berarti melakukan tindakan yang sudah *qat'iy* keselamatannya, sedang melakukannya adalah hal yang *zanniy*. Sedang tindakan yang *qat'iy* jauh lebih baik dari pada yang *zanniy*. Akan

tetapi hal itu merupakan tindakan terakhir setelah ditempuh alternatif-alternatif lain.

Meskipun nas nikah mut'ah dibenarkan oleh sebahagian mazhab, maka yang patut direnungkan adalah penarikan ijtihad Ibn Abbas dan sahabat lain serta para ulama. Dengan dibolehkannya nikah tersebut secara tidak langsung memberi peluang besar kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perzinaan dan menyatakan kawin mut'ah. Hal itu mudah terjadi sebab kedua belah pihak (laki dan perempuan) bebas mengawinkan dirinya, tanpa wali dan tanpa saksi.. Demikian pula konsekwensi perkawinan dapat melahirkan anak yang tidak beradab dan berpendidikan. Bukankah setelah ia dilahirkan atau belum, ayahnya telah kembali kedaerahnya karena memang ia seorang asing dan berada pada tempat itu untuk sementara. Sedangkan orang-orang yang hidup bersama keluarga mereka belum tentu mampu mendidik anak-anaknya dengan baik.

Oleh karena itu, alasan yang mengatakan bahwa lebih baik bermut'ah dari pada berzina adalah alasan yang tidak argumentatif. Seharusnya, lebih baik beristeri lebih dari satu dari pada melakukan zina dan perbuatan yang *ẓanniy* hukumnya, sementara nikah dâim, lebih dari satu dalil *qat'iy* dalam Alquran QS. (4):3. Dalam hal ini, mut'ah belum terlihat sejauh mana argumentasinya, baik menurut naql maupun akal, sehingga dapat dipandang sebagai suatu perkawinan yang dihalalkan dan nikah yang baik untuk umat Islam. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan *wallahu A'lam bi al-Sawâb*.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karîm

Al-Ahdal, Muhammad 'Abd al-Rahman Syamîlah. *Nikâh al-Mut'ah*. Cet. I; Damsyiq: Muassasah al-Khâfiqîn wa Maktbatuhâ, 1983.

Al-Asadiy, Abu Daûd Sulayman bin al-Asy'aş al-Sajastâniy, *Sunan Abî Dâwud*. Juz II. T.t.: Dâr al-Fikr, t.th.

Al-'Asqalâniy, Ibn Hajar. *Fath al-Bâriy*. Juz IX. Mesir: Dar al-Bayân li al-Turaş, 1978.

----- *Tagrîb al-Tahzîb*. Juz I-II. Pakistan: Dâr al-Nasyr al-Kutub al-Islâmiyah, 1393.

'Atat, Muhammad Salim, *Nikâh al-Mut'at 'Abr al-Târikh*. T.t.: Matba'ah al-Madaniy, t.th.

Ali, Ameer. *The Spirit of Islam; A History of The Prophet*. India: Idarat-i Adabiyat-i Delli, 1978.

Al-Amili, Ja'far Murtada. *Al-Zawâj al-Muaqqat fî al-Islâm*. Diterjemahkan oleh Abu Muhammad Jawad. *Nikâh Mut'ah Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.

Amin, Ahmad. *Duhâ al-Islâm*. juz III. Bairut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyy, t.th.

----- *Fajr al-Islâm*. Cet. XI; t.t.: t.tp., 1975.

Anwar Harjono. *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilan*. Cet.II. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Badran, Abu al-'Ainayn. *al-Zawâj wa al-Islâm*. Kairo: t.tp., t.th.

Al-Bukhâriy, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismâil. *Sahîh al-Bukhâriy*. Juz III. T.t.: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

Al-Buraey, Muhammad A. *Adminitrative Development: An Islamic Perspective*. Diterjemahkan Oleh Achmad Nashir Budiman.

Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan. Cet. I; Jakarta: Tajawali, 1983.

Al-Bustani, Butrus. *al-Qâmus al-Muhîl*. Juz I. Bairut: Maktabah Lubnan, t.th.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Vol. IV. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Fakhr al-Dîn, Muhammad al-Râziy, *Tafsîr al-Fakhr al-Râziy*, jilid XIII (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).

Faris, Abu Husayn Ahmad. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*. juz III. Mesir: Mustafa al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduhû, 1970.

Fyzee, A. A. *Outlines of Muhammadan Law*. London: Oxford University Press, 1955.

Al-Gazaliy, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*. Jilid II. Cet. III; Bairut, Dâr al-Fikr, 1991.

Al-Gitâ, Muhammad Husayn Ali Kâsyif. *Asl al-Syî'ah wa Usûluhâ*. T.t.: Maktabah al-Saqâfah al-Islâmiyah, t.th.

Al-Garnâthiy, Muhammad Yusuf, dikenal Abû Hayyân al-Andalûsiy. *al-Bahr al-Muhîl fî Tafsîr*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, 1993.

Gibb, H. A. R., (ed.). *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1953.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Umum UGM, 1977.

Al-Hamid, Muhammad. *Nikâh al-Mut'ah fî al-Islâm Harâm*. Bairut: Dâr al-Qalam, 1988.

Hanbalî, 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qâsim al-'Asîmiy. *Majmu' Fatâwâ Syekh al-Islâm Ibn Taymiyah*. Jilid XVIII. t.d.

Hâsyim, 'Abdullah. *Talkhîs al-Khabr fî Takhrij Ahâdîs al-Râfi'iy al-Kabîr*, Jilid II. Cet. II; Mesir: Syirkah al-Tabâ'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, t.th.

- Husen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Tentang Nikah Talak, Rujuk dan Kewarisan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Ansâriy. *Lisân al-'Arab*. Jilid III. Mesir: Muassasah al-Misriyyah li al-Ta'lif wa Tarjuman, t.th.
- Al-Jawziy, Syams al-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim. *Zâd al-Ma'ad fî Hadiy Khayr al-'Ibad*. Jilid IV. Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-Jassâs, Abu Bakar Ahmad 'Alî al-Râziy. *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz II. Bairut: Dâr al-Mushaf Syarikah Maktabah wa Matba'ah 'Abd al-Rahman Muhammad, t.th.
- Al-Jazîriy, 'Abd al-Rahman. *Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*. Jilid IV. Mesir: al-Maktabah al-Tijârah al-'Ubrâ, 1969.
- Al-Khatîb, Muhammad 'Ajjaj. *Usul al-Hadis 'Uluḡuhâ wa Mustalaha-hû*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Khaldun, 'Abd al-Rahman. *Tarîkh Ibn Khaldun*. Juz II. Cet. I. Bairut: Dâr al-Fikr li al-Tabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1981.
- Koentjaraningrat. *Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Al-Kulainiy, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub. *Furu' al-Kâfiy*. Juz V. Cet. III; Bairut: Dar al-Adhwâ, 1985.
- al-Munjid fî al-Lugah wa al-A'lâm*. Cet. XXVIII, Dâr al-Masyriq, 1986.
- Moenawar Chalil. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1956.
- Muhammad Muslehuddin. *Mut'a (Temporary Marriage)*. New York: Islamic Publication, 1989.
- Murtadha Mutahhari. *Jurisprudence and its Principles*. Vol. IV. Cet. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- *The Rights of Women in Islam*. Diterjemahkan oleh Hashem, M., *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Cet. II; Jakarta, Lentera, 1995.

- Al-Muwassawniy, al-Imâm al-Hâj Aqârun Allah. *Tahrîr al-Wasilah*. T.t.; Muassasah Matbu'ah Dâr al-'Ilm, t.th.
- Al-Nasâi, Abu 'Abd al-Rahman bin Syu'ayb. *Sunan al-Nasâi*. Juz V. Mesir Syirkah Maktabah wa Mustafa al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduhû, t.th.
- Al-Nawawiy. *Sahîh Muslim bi Syarh al-Nawawiy*. Juz IX. Cet. III; Bairut: Dâr al-Fikr, 1978.
- Al-Naysabûriy, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj al-Qusyayriy. *Sahîh Muslim*. Juz II. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Nur al-Dîn 'Itr. *Manhaj al-Naqd fi 'Uhum al-Hadîs*. Bairut Dâr al-Fikr, t.th.
- Okky Asokawati. "Nikah Mut'ah Diperlukan?". *Amanah*, No. 128, 1992.
- Al-Qazwîniy Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazîd. *Sunan Ibn Mâjah*. Juz I. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Qurtubiy, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Jilid V. Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr li al-Tabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1987.
- Al-Qutubiy, Abu al-Walid bin Muhammad bin Ahmad Rusyd al-Andalûsiy. *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*. Jilid II. T.t.: Dâr al-Fikr wa al-Tabâ'ah wa al-Nasyr wa Tawzi', t.th.
- Qutub, Sayyid. *Fî Zilâl al-Qur'ân*. Jilid II. Cet. XVII; Bairut; Dâr al-Masyriq, 1992.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Undang-Undang Perkawinan*. Surabaya: Gitamedia Press, t.th.
- Rus'an. *Lintasan Sejarah Islam di Zaman Rasulullah saw*. Cet. II; Semarang: Wicaksana, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II; Bairut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyy, 1985.
- Al-Sajastâniy, Abu Dâud Sulayman bin al-Asy'asy al-Azadiy. *Sunan Abî Dâud*. Juz II. T.t.: Dâr al-Fikr, t.th.

- Al-Samawiy, Muhammad al-Tayjâniy. *Li Akûn ma'a Sadiqîn*. Cet. I. Libanon: Muassasah al-Fajr, 1991.
- Al-San'âniy, Muhammad bin Isma'il. *Subl al-Salâm*. Jilid III. Riyad: al-Jâmi'ah al-Imam Muhammad bin Su'ûd al-Islâmiyah, 1408 H.
- Al-Sâyis, Muhammad Ali. *Tafsîr Ahkâm*. Jilid II. Bandung: al-Ma'ârif, 1980.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1996.
- Smith, Houston. *The Concise Encyclopedia of Islam*. London: Satecey International and Ciril Glasse, 1989.
- Al-Suyûthiy, 'Abd al-Rahman Jalâl al-Din. *al-Dur al-Ma'shur fi Tafsîr al-Ma'shur*. Jilid II. Cet. I; Bairut, Dâr al-Fikr, 1983.
- Al-Syâfi', Muhammad Idris. *al-Risâlah*. T.p.: Dâr al-Fikr, t.th.
- Syaltout, Mahmoud. *Fatwa-fatwa*. Jilid II. Diterjemahkan oleh A. Gani Bustani. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Al-Syanqîtiy, Muhammad Amîn. *Muzakkarah fi Usul al-Fiqh*. T.t.: al-Jâmi'ah al-Islâmiyah, t.th.
- Al-Syâtibiy, Abu Ishâq Ibrâhîm Musâ al-Lakhmiy al-Garnâtiy. *al-Muwâfaqât fi Usul al-Ahkâm*. Jilid I. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Syayrâziy, Abu Ishaq bin Ibrâhîm bin 'Ali bin Yusuf. *al-Lumâ' fi Usul al-Fiqh*. Cet. I; Bairut Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.
- Al-Syurbasyi, Ahmad. *al-Aimmah al-Arba'ah*. Diterjemahkan oleh Sabil Huda dan H. A. Ahmadi dengan judul. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1978.
- Al-Tabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil al-Qur'ân*. Juz V. Cet. II; Mesir, Syirkah Maktabah wa Ma'ba'ah Mustafa al-Bâbiy al-Halabiy wa Awlâduhû, 1954.
- Al-Tabatabai, Muhammad Husayn. *al-Mizân fi Tafsîr Alqurân*. Juz IV. Cet. I; Bairut: Muassasah al-A'lamiy li al-Matbu'ât, 1991.

Al-Turmuziy, Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Sawrah, *Sunan al-Turmuziy (al-Jâmi' al-Sahîh)*. Juz II. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Wensink, A.J. *Miftah Kunûz al-Sunnah..* Lahore: Suhayl Akademiy, 1391.

.....*al- Mu'jam al-Mufahras li al-Alfâz al-Ahâdiş al-Nabawiy.* Leiden: Brill, 1967.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Hanbali.* Jakarta: Hidayakarya Agung, 1985.

Zahir, Ihsan Ilahi. *Al-Syî'ah wa al-Tasyayyu'; Firaq wa Târikh..* Cet.III; Pakistan, Idarah Tarjuman al-Sunnah, 19884.

Syarh Muwatta' Imâm Mâlik. Jilid III. Kairo: Dar al-Fikr, 1959.

Al-Zuhayliy, Wahbah. *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj.* Juz V. Bairut: Dâr al- al-Fikr al-Ma'âsir, 1991.

PERPUSTAKAAN PUSAT
IAIN ALAUDDIN

